

1. Pencegahan Fraud Dengan E-Procurement.pdf

by Dekar Urumsah

Submission date: 12-Feb-2019 01:36PM (UTC+0700)

Submission ID: 1076888517

File name: 1._Pencegahan_Fraud_Dengan_E-Procurement.pdf (395.36K)

Word count: 17206

Character count: 113679

**PENCEGAHAN *FRAUD*
DENGAN *E-PROCUREMENT***

Dekar Urumsah
Namida Valoni
Faishal Asmu'i



Penerbit EKONISIA
Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

PENCEGAHAN FRAUD DENGAN E-PROCUREMENT

Oleh:

Dekar Urumsah, Namida Valoni, & Faishal Asmu'i

Hak cipta @ 2017, pada penulis

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Penulis dan atau Penerbit Ekonisia

Edisi Pertama

Cetakan Pertama, Desember 2017

Hak Penerbitan pada EKONISIA Yogyakarta

Penerbit EKONISIA
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia
Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telp (0274) 886478, 881546 Fax. (0274) 882589

ISBN: 978-602-6617-05-7

KATA PENGANTAR

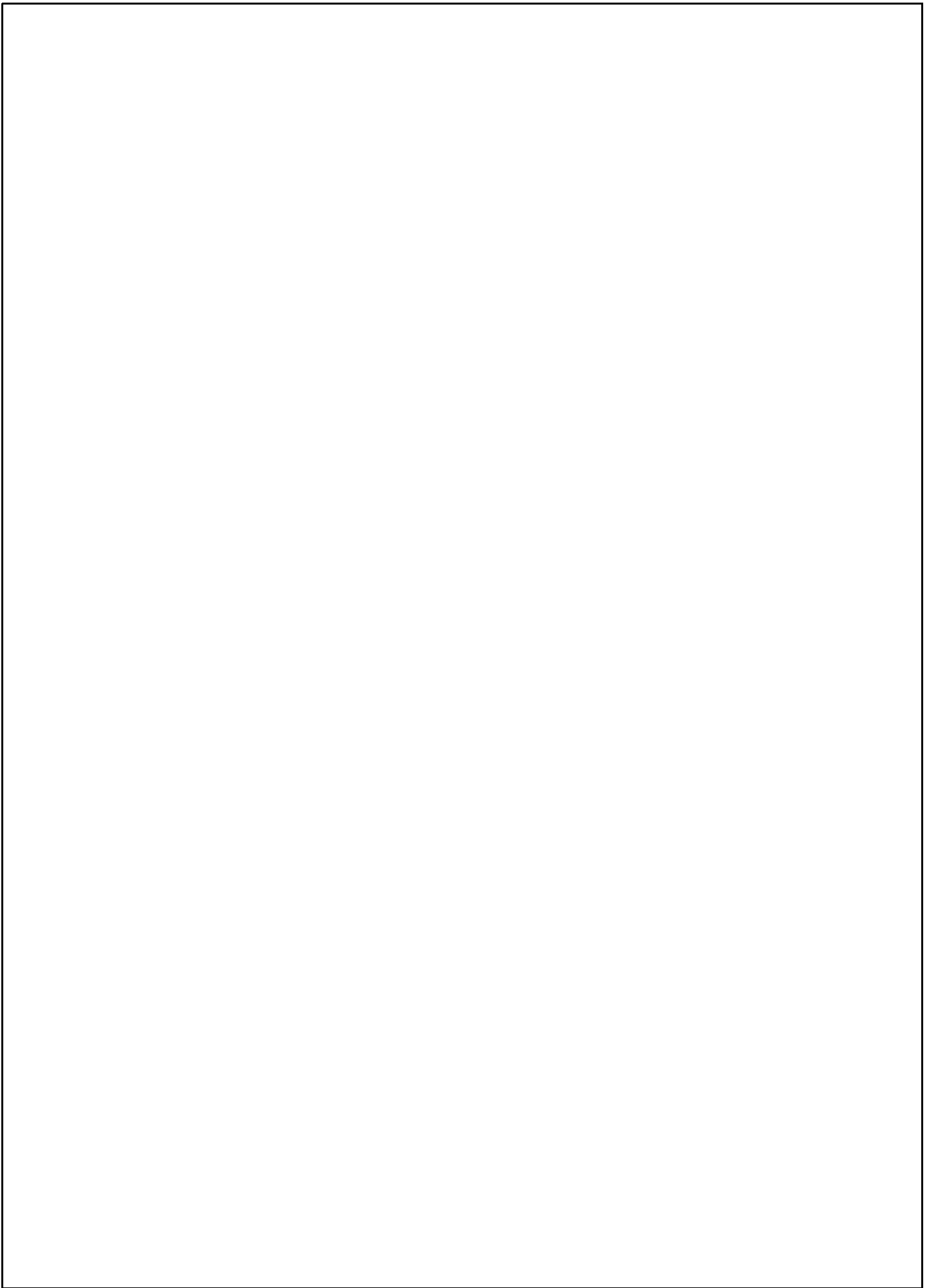
Buku ini memaparkan pencegahan *fraud* dengan *e-Procurement* pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan organisasi pemerintah. Pembahasan dalam buku ini akan membahas penerapan *e-Procurement* yang efektif untuk mencegah *fraud* dan beberapa faktor lainnya yang efektif dalam pencegahan *fraud*. Oleh karena itu, penulis tidak hanya melakukan kajian literatur, namun juga menyajikan bukti empiris dari penelitian yang telah dilakukan. Penulis berharap buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan bagi para akademisi maupun para praktisi guna mencegah atau paling tidak untuk mengurangi secara signifikan tindakan *fraud*, khususnya *fraud* pada pengadaan barang dan jasa di organisasi pemerintah, khususnya pemerintah daerah.

Buku ini terdiri dari 2 (dua) bahasan utama. Bahasan pertama, disajikan pada Bab 1 yang fokus untuk membahas dan membuktikan (secara empiris) mengenai efektivitas sistem informasi *e-Procurement*. Bahasan kedua, disajikan pada Bab 2, membahas dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh berbagai faktor (termasuk *e-Procurement*) dalam mencegah tindakan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa. Pada setiap sub bab untuk bab 1 dan 2 akan dijelaskan secara detail mengenai peran dan efektivitas *e-Procurement* serta faktor-faktor lainnya yang dapat mencegah tindakan *fraud* pengadaan barang dan jasa; kajian pustaka; model konseptual penelitian; hipotesis yang dikembangkan; karakteristik responden yang terlibat; ulasan alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis; hasil analisis berikut dengan pembahasannya; kontribusi dan implikasinya. Selain ke dua bab tersebut, buku ini juga menyertakan lampiran yang memaparkan detail hasil uji statistik. Hal ini dimaksudkan guna memudahkan para pembaca yang ingin mengetahui lebih rinci tentang informasi detail hasil uji statistik yang telah dilakukan oleh penulis.

Akhirnya, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada berbagai pihak, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan hingga menerbitkan buku ini. Ucapan terima juga penulis sampaikan kepada Briyan Efflin Syahputra yang juga telah membantu penulis dalam menyelesaikan buku ini.

Yogyakarta, Desember 2017

Penulis

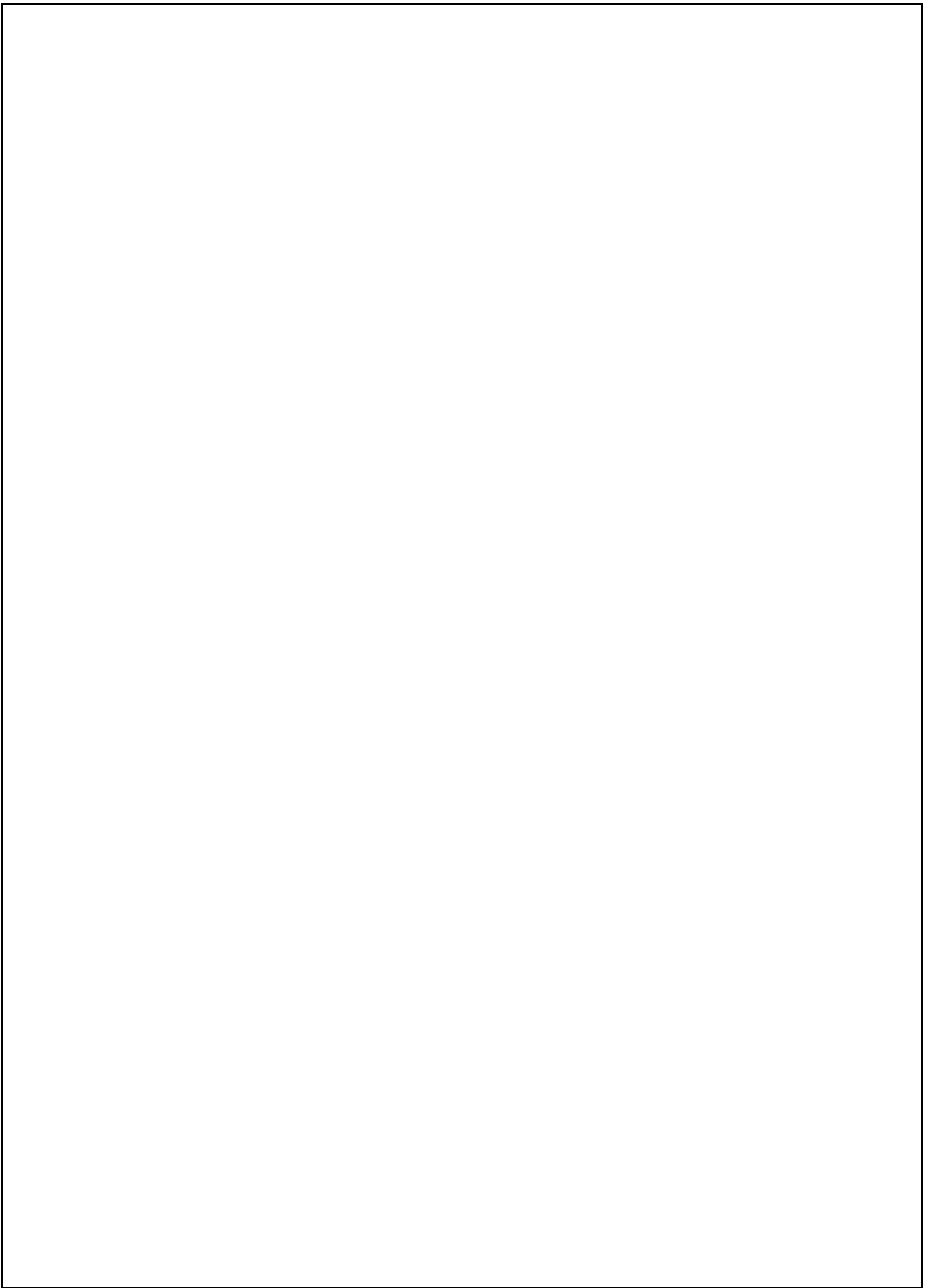


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
BAB 1 EFEKTIVITAS SISTEM <i>E-PROCUREMENT</i>	1
1.1 Efektifitas dan Efisiensi <i>E-Procurement</i> dalam Proses Pengadaan Barang atau Jasa	1
1.1.1 Hubungan <i>E-Procurement</i> dan <i>E-Government</i>	2
1.1.2 Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	3
1.1.3 Perkembangan Implementasi <i>E-Procurement</i> di Organisasi Pemerintah Indonesia	4
1.2 Konsep Efektivitas <i>E-Procurement</i>	5
1.2.1 Teori Kesuksesan Sistem Informasi	5
1.2.2 Kualitas Sistem	6
1.2.3 Kualitas Informasi	7
1.2.4 Kualitas Pelayanan	7
1.2.5 Kepuasan Pengguna	8
1.2.6 Efektifitas Sistem Informasi	9
1.3 Analisis Efektivitas <i>E-Procurement</i>	9
1.3.1 Kualitas Sistem dan Kepuasan Pengguna	10
1.3.2 Kualitas Informasi dan Kepuasan Pengguna	10
1.3.3 Kualitas Layanan dan Kepuasan Pengguna	11
1.3.4 Kepuasan Pengguna dan Efektivitas Sistem <i>E-Procurement</i>	11
1.3.5 Model Efektivitas Sistem <i>E-Procurement</i>	12
1.4 Menguji Efektivitas <i>E-Procurement</i>	12
1.4.1 Tinjauan Strategi Analisis Data	13
1.4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Model Efektifitas Sistem <i>E-Procurement</i>	14
1.4.3 Karakteristik Demografis	14
1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas <i>E-Procurement</i>	15
1.5.1 Hipotesis Kualitas Sistem dan Kepuasan Pengguna	15
1.5.2 Hipotesis Kualitas Informasi dan Kepuasan Pengguna	16
1.5.3 Hipotesis Kualitas Layanan dan Kepuasan Pengguna	16
1.5.4 Hipotesis Kepuasan Pengguna Efektivitas <i>E-Procurement</i>	17
1.6 Kesimpulan	17
1.6.1 Kontribusi dan Implikasi	18
DAFTAR PUSTAKA	19
LAMPIRAN	28
Daftar Isi	v

BAB 2 FAKTOR-FAKTOR PENCEGAHAN <i>FRAUD</i>: PERANAN <i>E-PROCUREMENT</i>	29
2.1. Mencegah <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	29
2.1.1 Sekilas Hubungan <i>E-Procurement</i> (Teknologi), Pengendalian Internal (Organisasi), Audit Internal (Organisasi) dan Kualitas SDM terhadap <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	31
2.2 Konsep Metode Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	32
2.2.1 <i>Fraud</i>	32
2.2.2 Konsep Sistem Informasi	34
2.3 Analisis Metode Pencegahan <i>Fraud</i> Barang dan Jasa	37
2.3.1 <i>E-Procurement</i> dan Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	37
2.3.2 Pengendalian Internal dan Pencegahan <i>Fraud</i> Barang dan Jasa --	38
2.3.3 Audit Internal dan Pencegahan <i>Fraud</i> Barang dan Jasa	38
2.3.4 Pelatihan yang Efektif dan Pencegahan <i>Fraud</i> Barang dan Jasa--	39
2.3.5 Sikap Positif terhadap Peraturan dan Pencegahan <i>Fraud</i> Barang dan Jasa	40
2.3.6 Tingkat Kesadaran terhadap Kecurangan dan Pencegahan <i>Fraud</i> Barang dan Jasa	40
2.3.7 Model Efektif Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa --	41
2.4 Menguji Metode Pencegahan <i>Fraud</i> Barang dan Jasa	41
2.4.1 Tinjauan Strategi Analisis Data	42
2.4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Model Efektif Pencegahan <i>Fraud</i>	43
2.4.3 Karakteristik Demografis	43
2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan <i>Fraud</i> Barang dan Jasa	43
2.5.1 Hipotesis <i>E-Procurement</i> dan Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	44
2.5.2 Hipotesis Pengendalian Internal dan Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	45
2.5.3 Hipotesis Audit Internal dan Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	46
2.5.4 Hipotesis Pelatihan yang Efektif dan Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	46
2.5.5 Hipotesis Sikap Positif terhadap Peraturan dan Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	47
2.5.6 Hipotesis Tingkat Kesadaran terhadap <i>Fraud</i> dan Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	48

2.6 Kesimpulan	48
2.6.1 Kontribusi dan Implikasi	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	64



BAB 1

EFEKTIVITAS SISTEM *E-PROCUREMENT*

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu kegiatan yang paling rawan akan terjadinya tindakan *Fraud*. Maka dari itu, implementasi sistem informasi (SI) berbasis teknologi, seperti *e-Procurement*, sedang diupayakan oleh banyak organisasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan, termasuk didalamnya organisasi publik seperti di pemerintahan. Implementasi *e-Procurement* pada dasarnya bertujuan untuk membuat proses pengadaan menjadi lebih efektif dan efisien serta transparan, sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi. Tujuan lainnya yaitu untuk meminimalisir berbagai tindakan *fraud* (seperti korupsi) yang mungkin akan terjadi.

1.1 Efektifitas dan Efisiensi *E-Procurement* dalam Proses Pengadaan Barang atau Jasa

Implementasi SI berbasis teknologi memiliki peran penting tidak hanya di bidang bisnis tetapi juga di pemerintahan. SI berbasis teknologi berfungsi untuk membantu suatu organisasi agar pekerjaan didalamnya menjadi lebih efektif dan efisien (Urumsah, 2014). Pemanfaatan SI berbasis teknologi juga merupakan salah satu cara terbaik yang dapat digunakan suatu organisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanannya (Urumsah, 2015).

Salah satu bentuk implementasi dari teknologi ini adalah *e-Procurement*. Sistem *e-Procurement* merupakan aplikasi perangkat lunak berbasis Internet yang

dirancang guna memfasilitasi proses perolehan barang ataupun jasa oleh organisasi komersial atau pemerintah (MacManus, 2002; dan Wirtz, Lutje, dan Schierz, 2010).

Pengadaan barang atau jasa merupakan kegiatan penting yang selalu ditemui di semua organisasi, publik, swasta, pemerintah, dan badan amal. Tentunya kegiatan pengeluaran yang besar atas pengadaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan (Croom dan Johnston, 2003). *E-Procurement* dapat diimplementasikan oleh suatu organisasi guna mendukung proses pengadaan barang dan jasa. Melalui *e-Procurement* proses jual beli barang atau jasa akan dilakukan secara online agar proses ini menjadi lebih efektif dan efisien serta melalui sistem ini proses penjualan barang dan jasa menjadi lebih transparan. Prosesnya yang secara online akan membuat proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih terbuka dan tidak berbelit-belit, sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja dari organisasi (Udoyono, 2012). Selain itu, *e-Procurement* juga memiliki kontribusi potensial yang besar dalam menekan atau mengurangi biaya transaksi dan dapat digunakan untuk meningkatkan sumber strategis (Subramaniam, Qualls, dan Shaw, 2003).

1.1.1 Hubungan *E-Procurement* dan *E-Government*

Sejumlah organisasi sektor publik di seluruh dunia saat ini telah memprioritaskan proses penerapan pengadaan barang elektronik (*e-Procurement*) sebagai agenda utama pengembangan dari *e-Government* (Vaidya et al, 2006). *E-Government* sendiri dapat dikatakan sebagai tipe/jenis lain dari *e-Services* (Urumsah, 2015). *E-Government* merupakan pemanfaatan aplikasi Internet dan teknologi jaringan untuk secara digital memungkinkan hubungan pemerintah dan agen sektor publik dengan masyarakat, bisnis, dan pihak pemerintah lainnya. Selain untuk meningkatkan penyampaian pelayanan pemerintah, *e-Government* dapat membuat kegiatan operasional pemerintah menjadi lebih efisien dan efektif, contohnya yaitu penerapan *e-Procurement* (Laudon dan Laudon, 2007).

Melalui *e-Procurement* transaksi jual beli pemerintah akan dilakukan secara *online*, yang membuat proses ini menjadi lebih efektif dan dapat menekan beberapa biaya (efisien). Di Indonesia, implementasi sistem *e-Procurement* pada organisasi pemerintah didorong karena adanya sejumlah kasus korupsi yang disebabkan oleh kegiatan pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan data kasus korupsi tahun 2004-2016 yang diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat 148 kasus korupsi yang terjadi terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kasus korupsi yang terjadi terkait dengan pengadaan barang dan jasa, termasuk sebagai salah satu dari dua kasus korupsi tertinggi yang terjadi di Indonesia (KPK, 2017). Maka dari itu, penting sekali untuk menciptakan sistem informasi pengadaan berbasis teknologi melalui Internet sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai. Efektivitas penggunaan sistem informasi

berbasis teknologi di sektor publik akan berdampak pada kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Semakin tinggi kualitas pelayanan kepada masyarakat, semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya (Handayani, 2010).

1.1.2 Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

SI berbasis teknologi seperti *e-Procurement* adalah penggunaan teknologi berbasis web untuk mendukung kegiatan pengadaan barang dan jasa. *E-Procurement* telah menggantikan kegiatan pengadaan secara tradisional yang cukup rumit dan memakan waktu. Pada proses tradisional, personil pengadaan barang harus melakukan proses seperti mengkualifikasi *supplier*, menegosiasi harga, dan membuat laporan secara manual.

Transparansi yang dihasilkan dari implementasi SI berbasis teknologi seperti *e-Procurement* membuat pihak yang mengadakan pengadaan barang/jasa dapat terhindar dari kasus penyelewengan dana ataupun korupsi, sehingga saat ini *e-Procurement* dapat menjadi alat untuk mencegah terjadinya korupsi (Yuwinanto, 2013). Sistem *e-Procurement* juga membuat semua pengguna layanan pemerintah memiliki hak aksesibilitas dan hak atas informasi yang sama. Penyerahan dokumen fisik dan proses administrasi yang menambahkan beban dan memakan waktu serta biaya operasional telah berkurang secara signifikan. Selain itu, masyarakat umum juga dapat mengetahui kegiatan pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga menghindari kecurigaan publik terhadap pemerintah.

E-Procurement memberikan dampak yang positif terhadap pengukuran kinerja pengadaan pada banyak organisasi (Subramaniam et al, 2003). Berdasarkan pengukuran operasional, pengurangan kesalahan dan pembelian dapat dipengaruhi secara signifikan dengan *e-Procurement*. Pengukuran strategis yang paling berpengaruh dengan *e-Procurement* adalah kepuasan pengguna yang akan memberikan kemudahan dalam proses pembelian atau pengadaan barang/jasa. Setidaknya terdapat enam keuntungan yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan *e-Procurement* antara lain: (a) meningkatkan komunikasi; (b) mempererat hubungan dengan pihak *supplier*; (c) mengurangi biaya transaksi karena mengurangi penggunaan telepon atau fax atau dokumen-dokumen yang menggunakan kertas; (d) mengurangi waktu pemesanan barang; (e) menyediakan laporan untuk evaluasi; dan (f) meningkatkan kepuasan *user* (Sofian, Ilat, dan Wokas, 2013).

1.1.3 Perkembangan Implementasi *E-Procurement* di Organisasi Pemerintah Indonesia

Perkembangan *e-Procurement* di organisasi pemerintah Indonesia dimulai tahun 2003 dengan terbitnya Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Walaupun sudah dimungkinkan dari segi regulasi, perkembangan penggunaan sistem pengadaan secara elektronik di organisasi pemerintah belum menunjukkan kemajuan yang berarti dan hanya di beberapa instansi pemerintahan yang mulai menerapkan sistem tersebut.

Belum optimalnya pelayanan publik pada organisasi pemerintah, kegiatan pengadaan barang/jasa pada organisasi pemerintah masih mempunyai banyak masalah baik itu prosedur ataupun hasilnya. *E-Procurement* dapat menjadi salah satu solusi untuk mencegah kasus *fraud* guna menciptakan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil dan akuntabel sesuai dengan prinsip dasar Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2003.

Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia mulai mempersiapkan lembaga pengadaan barang/jasa secara elektronik sehingga terbentuk susunan mulai dari ketua, sekretaris, serta pengelola sistem di tahun 2009. Pada bulan Januari tahun 2010, sistem pengadaan barang dan jasa mulai diimplementasikan.

Pada tahun 2010, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada pasal 7 dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tersebut dijelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia yang antara lain: (a) kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya (K/L/D/I) adalah instansi/institusi yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); (b) lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa; (c) pengguna anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/APBD; (d) kuasa pengguna anggaran (KPA) adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan APBD; (e) pejabat pembuat komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa; (f) unit layanan pengadaan (ULP) adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri, atau melekat pada unit yang sudah ada; (g) pejabat pengadaan

adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa; (h) panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan; (i) aparat pengawas intern pemerintah (APIP) atau pengawas intern pada institusi lain adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi; dan (j) penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.

1.2 Konsep Efektivitas *E-Procurement*

Teori kesuksesan sistem informasi yang dibangun oleh DeLone dan McLean (1992) merupakan ¹teori yang sangat populer digunakan untuk menguji kesuksesan suatu sistem informasi. Model yang dibangun oleh DeLone dan McLean (1992) ini, telah mengalami sedikit perubahan, seiring dengan adanya kritik dari peneliti lainnya. Melalui perubahan tersebut, menjadikan model ini tergolong lengkap dan sederhana (persimoni) dan hal inilah yang menjadi salah satu alasan banyaknya peneliti lainnya menggunakan model yang telah dibangun oleh DeLone dan McLean (2003) ini.

1.2.1 Teori Kesuksesan Sistem Informasi

Proses desain sebuah sistem informasi tentunya diharapkan dapat berfungsi secara efektif. Keefektifan ini juga sebagai petanda bahwa pengembangan sistem informasi tersebut telah sukses (Susanty, 2013). Terdapat beberapa model penelitian yang telah dikembangkan oleh peneliti terdahulu untuk menilai kesuksesan sebuah sistem informasi, salah satu model yang paling banyak digunakan yaitu model yang telah dikembangkan oleh DeLone dan McLean (1992). Melalui model ini diketahui bahwa kesuksesan dari sistem informasi dapat diwakili atau dapat diukur dari enam faktor, yaitu: (a) karakteristik kualitas sistem informasi itu sendiri (kualitas sistem); (b) kualitas *output* dari sistem informasi (kualitas informasi); (c) konsumsi *output* dari sistem informasi (penggunaan); (d) respon pengguna sistem informasi terhadap sistem informasi (kepuasan pengguna); (e) efek dari sistem informasi pada perilaku pengguna (dampak individual); (f) dan efek dari sistem informasi pada kinerja organisasi (dampak organisasi) (DeLone dan McLean, 1992). ¹Model ini dianggap cukup persimoni (lengkap dan sederhana) sehingga banyak dipakai menjadi acuan dalam menguji kesuksesan sistem informasi.

Pada tahun 1997, Seddon membantah ¹model kesuksesan sistem informasi yang telah dikembangkan oleh DeLone dan McLean (1992), karena

1 dianggap rumit. Penggunaan sistem informasi adalah suatu perilaku, bukanlah ukuran kesuksesan, sehingga dalam penelitian yang dilakukan Seddon (1997), variabel penggunaan sistem informasi (*system use*) dalam model DeLone dan McLean (1992) diganti menjadi persepsi kegunaan (*perceived usefulness*). Namun, DeLone dan McLean (2003) tidak sependapat dengan kritik yang diberikan oleh Seddon (1997), mereka berargumentasi bahwa pemakaian sistem harus mendahului dampak dan manfaat, tetapi tidak menyebabkan dampak dan manfaat. Beberapa usulan untuk perbaikan terhadap model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean juga muncul, karena ketidakjelasan antara apa yang termasuk variabel independen dan apa yang merupakan bagian dari variabel dependen dalam mengukur kesuksesan sistem informasi.

1 Menanggapi berbagai kritikan tersebut, DeLone dan McLean (2003) memperbaiki modelnya dengan menambahkan kualitas pelayanan (*service quality*) sebagai alat ukur/variabel baru dalam kesuksesan sistem informasi, menambahkan konstruk/variabel niatan untuk menggunakan (*intention to use*) sebagai alternatif dari konstruk/variabel penggunaan sistem (*use*), dan menggantikan konstruk/variabel dampak individual dan dampak organisasi menjadi konstruk/variabel manfaat organisasi (*net benefit*).

1.2.2 Kualitas Sistem

1 Kualitas sistem berkaitan dengan apakah tidak ada *bug* (kesalahan dalam sistem) yang disebabkan oleh *software* atau *hardware*, konsistensi antarmuka pengguna, kemudahan penggunaan, tingkat respons dalam sistem interaktif, kualitas dan pemeliharaan dari program aplikasi (Seddon dan Kiew, 1996). Kualitas sistem menjelaskan pengukuran *website* sebagai sistem pengolahan informasi. Sebagai desain *website* dalam kerangka sistem informasi, kualitas sistem masih merupakan ukuran penting dalam konteks kualitas sistem sebuah *website*. Beberapa contohnya adalah desain; penampilan dan kecukupan teknis; kelambatan dalam mengunduh; navigasi; dan keamanan dan privasi. Ukuran kualitas sistem ini memungkinkan untuk menyediakan kenyamanan yang lebih bagi penggunanya, meningkatkan privasi, dan mengurangi waktu untuk mencari informasi (Ahn, Ryu, dan Han, 2004).

Kualitas sistem dalam lingkungan Internet mengukur karakteristik yang diinginkan dari sistem *e-Commerce*. Ketergunaan, ketersediaan, keandalan, kemampuan beradaptasi, dan waktu respon (misalnya waktu untuk mengunduh), adalah contoh dari kualitas yang dihargai oleh para pengguna sistem *e-Commerce* (DeLone dan Mclean, 2003). Kualitas sistem yang lebih tinggi diharapkan dapat memberikan tingkat kepuasan pengguna dan penggunaan yang tinggi, mengarahkan pada dampak positif terhadap produktivitas individu yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas organisasi.

Kualitas sistem biasanya diukur dengan item seperti mudah digunakan, mudah dipelajari, mudah untuk menjadi terampil dalam menggunakan, dan dapat berinteraksi dengan cara yang jelas serta mudah dipahami (Landrum, Prybutok, Strutton, dan Zhang, 2008). Selain itu, kualitas sistem juga meliputi langkah-langkah dari sistem pengolahan informasi itu sendiri, seperti waktu respon, keandalan, fleksibilitas sistem, dan kelengkapan (DeLone dan McLean, 1992).

1.2.3 Kualitas Informasi

Kualitas informasi dapat diartikan sebagai persepsi pengguna suatu *website* terhadap kegunaan dan kualitas konten *website* tersebut. Kualitas informasi meliputi ukuran keluaran (*output*) sistem informasi, yaitu kualitas informasi yang dihasilkan suatu sistem, terutama dalam bentuk laporan (DeLone dan McLean, 1992). Selain itu, kualitas informasi biasanya juga berkaitan dengan isu-isu, seperti ketepatan waktu, akurasi, relevansi, dan format informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi (Seddon dan Kiew, 1996). Kualitas Informasi akan mengacu pada akurasi (*accuracy*), relevansi (*relevance*), ketepatan (*accuracy*), keandalan (*reliability*), kelengkapan (*completeness*), dan terkini (*currency*) (Landrum et al, 2008).

Secara tradisional, kualitas informasi adalah kualitas laporan yang dihasilkan oleh suatu sistem. Dalam lingkungan *web*, informasi yang berkaitan tidak hanya laporan atau keluarannya (*output*), tetapi juga kehadiran dari pengguna sistem itu sendiri dalam menggunakan sistem. Item yang paling umum digunakan untuk mengukur kualitas informasi dalam beberapa penelitian adalah akurasi, terkini, kelengkapan, ketepatan waktu, dan dapat dimengerti (Ahn et al, 2004).

1.2.4 Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah perbandingan antara harapan konsumen dan persepsi mereka atas kualitas pelayanan yang diberikan (Parasuraman, Zeithaml, dan Berry, 1988). Kualitas pelayanan pada bidang teknologi memiliki definisi yang berbeda dengan kualitas pelayanan secara tradisional. Kualitas pelayanan secara tradisional lebih dimaksudkan pada pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumennya. Terdapat lima indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan secara tradisional, yaitu: (a) real/jelas (*tangible*); (b) keandalan (*reliability*); (c) responsif (*responsiveness*); (d) jaminan (*assurance*); (e) dan empati (*emphaty*) (Parasuraman et al, 1988). Indikator ini digunakan oleh banyak penelitian yang mengadopsi model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean (2003) dalam variabel kualitas pelayanan.

Gefen (2002) adalah peneliti yang mengembangkan kualitas pelayanan tradisional tersebut dalam konteks elektronik dan mengelompokkan lima dimensi kualitas pelayanan menjadi tiga dimensi, yaitu (a) real/jelas (*tangibles*); (b) kombinasi dari responsif (*responsiveness*), keandalan (*reliability*), dan jaminan (*assurance*); dan (c) empati (*emphaty*). Dalam penelitian tersebut, dimensi jelas/real merupakan dimensi paling penting dalam meningkatkan kesetiaan konsumen. Item-item dalam penelitian Gefen (2002) telah disesuaikan dengan konteks elektronik, seperti dimensi jelas/real mewakili tampilan situs web.

Kualitas pelayanan mendapatkan perhatian lebih pada dunia *e-Commerce* karena konsumen menggunakan situs web sebagai media dalam bertransaksi. Kualitas dari situs web itu sendiri dianggap sebagai bentuk pelayanan, misalnya kemudahan dalam mengoperasikan situs web tersebut. Terdapat empat dimensi kualitas pelayanan berbasis elektronik yang kemudian disingkat menjadi E-S-Qual antara lain: (a) efisiensi (*efficiency*), yaitu kemudahan dan kecepatan dalam mengakses dan menggunakan situs web; (b) pemenuhan (*fulfillment*), yaitu sejauh mana *website* menjanjikan pengiriman pesanan dan ketersediaan barang terpenuhi; (c) ketersediaan sistem (*system availability*), yaitu fungsionalitas teknis sebuah situs, apakah berfungsi sebagaimana mestinya; dan (d) kerahasiaan pribadi (*privacy*), yaitu keamanan dan perlindungan terhadap informasi pribadi konsumen (Parasuraman, Zeithaml, dan Malhotra, 2005).

Pengukuran terhadap kualitas pelayanan secara elektronik tidak hanya mengacu pada dimensi tertentu. Terdapat berbagai macam modifikasi yang disesuaikan dalam mengukur kualitas situs web secara lebih spesifik sesuai dengan jasa yang ditawarkan oleh setiap penyedia jasa, seperti penelitian pada bidang perbankan, kesehatan, keperawatan, atau situs yang digunakan dalam pendidikan.

1.2.5 Kepuasan Pengguna

Kepuasan pengguna adalah sikap afektif terhadap suatu aplikasi komputer tertentu oleh seseorang yang berinteraksi dengan aplikasi tersebut secara langsung (Doll dan Torkzadeh, 1988). Sedangkan kepuasan pengguna terhadap sistem informasi adalah bagaimana cara pengguna memandang suatu sistem informasi secara nyata, tapi tidak pada kualitas sistem secara teknik (Guimares, Staples, dan McKeen, 2003). Adanya kepuasan pengguna ternyata dapat meningkatkan loyalitas dari konsumen/pengguna, dapat mengurangi elastisitas harga, melindungi pangsa pasar dari berbagai pesaing, efisiensi biaya, dan meningkatkan reputasi (Jonathan, 2013).

Kepuasan pengguna merupakan ukuran tunggal yang paling banyak digunakan dalam penelitian kesuksesan sistem informasi karena: (a) kepuasan memiliki tingkat validitas yang tinggi dimana kesuksesan sistem adalah saat pengguna mengatakan bahwa mereka menyukai sistem tersebut; (b) pengembangan dari instrumen Bailey dan Pearson (1983) yang memberikan alat yang handal untuk mengukur kepuasan dan menciptakan perbandingan antar studi; dan (c) saran untuk konstruk kepuasan sebagai ukuran kesuksesan adalah yang paling banyak dalam penelitian sistem informasi dibandingkan konstruk yang lain (DeLone dan McLean, 1992).

1.2.6 Efektifitas Sistem Informasi

Efektifitas berkaitan dengan kualitas, kuantitas, waktu yang digunakan dan hasil kerja yang telah dicapai, dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan lebih dulu (Ompusunggu, 2002). Selain itu, efektifitas juga merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang harus dicapai (Supriyono, 2000). Suatu unit organisasi dapat dikatakan efektif apabila pencapaian lebih besar dibandingkan usaha untuk mendapatkannya.

Efektifitas sistem informasi merupakan upaya organisasi untuk memanfaatkan kemampuan dan potensi sistem informasi yang dimiliki untuk mencapai tujuan (Simatupang dan Akib, 2007). Suatu organisasi dapat dikatakan memiliki sistem informasi yang efektif apabila dalam penggunaannya, sistem informasi tersebut dapat mewujudkan tujuan dari organisasi (Handayani, 2010). Dalam penelitian terdahulu diketahui bahwa, efektifitas teknologi informasi dinilai berdasarkan peningkatan efektifitas, peningkatan komunikasi, pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan respon organisasi, dan sistem informasi secara keseluruhan (Gupta, Kanungo, Kumar, dan Sahu, 2007).

1.3 Analisis Efektifitas *E-Procurement*

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai penggunaan teori ¹ **kesuksesan sistem informasi yang dibangun oleh DeLone dan McLean** (2003) untuk membangun model efektifitas sistem informasi *e-Procurement*. Teori kesuksesan sistem informasi ini akan digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas penggunaan sistem informasi *e-Procurement*.

1.3.1 Kualitas Sistem dan Kepuasan Pengguna

Kualitas sistem merupakan representasi beberapa aspek suatu sistem yang memberikan keuntungan untuk organisasi dilihat dari perspektif pengguna sistem informasi (Ives dan Olson, 1984). Kualitas sistem dinilai berdasarkan kemampuan dari sistem informasi untuk memproses dan mengirimkan informasi sehingga memberikan manfaat bagi penggunanya. Semakin tinggi kualitas sistem yang dimiliki maka kepuasan pengguna sistem tersebut akan semakin meningkat menurut persepsinya.

Dalam penelitian yang dilakukan beberapa peneliti seperti Istianingsih dan Utami (2008); Ramdan, Azizan, dan Saadan (2014) ; dan Saputra (2016) membuktikan bahwa kualitas sistem memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pengguna. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Rizki, Suroso, dan Ramadhan (2016) menunjukkan hasil yang sebaliknya. Maka dari itu, untuk menguji kembali pengaruh dari kualitas sistem terhadap kepuasan pengguna diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kualitas sistem memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna akhir

1.3.2 Kualitas Informasi dan Kepuasan Pengguna

Kualitas informasi berhubungan dengan kualitas dari keluaran sistem informasi. Dalam literatur sistem informasi, kualitas informasi dari keluaran sistem informasi sering digunakan sebagai salah satu kriteria penting dalam menilai kepuasan pengguna akhir yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberhasilan sistem informasi. Penekanan atas aspek kualitas informasi di dalam pengimplementasian sistem informasi akan meningkatkan kepuasan penggunanya sehingga pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap keberhasilan implementasi sistem informasi (DeLone dan McLean, 2003).

Dalam penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Seddon dan Kiew (1996); Livari (2005); Wu dan Wang (2006); dan Saputra (2016) membuktikan bahwa kualitas informasi mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap kepuasan pengguna akhir. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Rizki et al. (2016) menunjukkan hasil yang sebaliknya. Sehingga, untuk menguji kembali pengaruh variabel kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna, diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kualitas informasi memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna akhir.

1.3.3 Kualitas Layanan dan Kepuasan Pengguna

Konsep dari kualitas layanan dapat dipahami dari dua sudut pandang yang berbeda, baik dari persepsi pengguna maupun dari persepsi kinerja pelayanan. Kualitas layanan jika dilihat dari persepsi pengguna dapat didefinisikan sebagai anggapan dari pengguna terhadap baik atau buruknya pelayanan yang diterima oleh pengguna. Sedangkan kualitas layanan jika dilihat dari persepsi kinerja pelayanan adalah pemberian pelayanan terbaik dari sumber yang dimiliki oleh penyedia layanan (Rahmawati, 2010). Kualitas pelayanan merupakan variabel yang perlu ditambahkan dalam mengukur kesuksesan sistem informasi selain variabel kualitas sistem dan kualitas informasi. Kualitas sistem dan kualitas informasi merupakan komponen kualitas yang diperlukan untuk mengukur keberhasilan suatu sistem, tetapi kepuasan pelayanan merupakan komponen yang penting untuk mengukur keberhasilan departemen sistem informasi secara keseluruhan. Melalui kualitas layanan yang maksimal maka dapat menciptakan kepuasan pengguna (Mardikawati dan Farida, 2013).

Hasil penelitian yang dilakukan Rahmawati (2010); Setyaningsih (2014); dan Saputra (2016) membuktikan bahwa kualitas pelayanan terbukti secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepuasan penggunanya. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Rizki et al. (2016) menunjukkan hasil yang sebaliknya. Berdasarkan uraian di atas, diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna akhir.

1.3.4 Kepuasan Pengguna dan Efektivitas Sistem *E-Procurement*

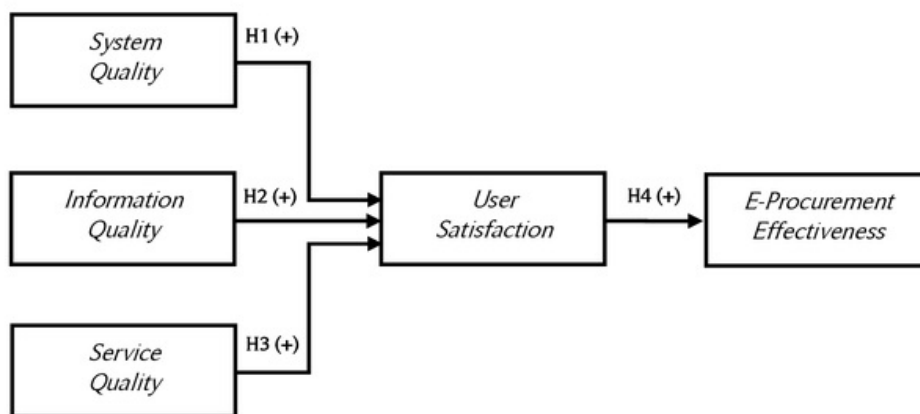
Harapan pemakai sistem informasi menentukan kepuasan pengguna sistem informasi. Oleh karena itu, penting bagi pengembang sistem informasi untuk mengetahui harapan para pemakai sistem informasi sehingga pada akhirnya mereka akan mencapai kepuasan dalam menggunakan sistem informasi. Untuk itu, para pengguna hendaknya dilibatkan dalam pengembangan sistem. Kepuasan pengguna terhadap sistem informasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sistem informasi (Handayani, 2010). Hasil dari penelitian Gupta et al. (2007); dan Saputra (2016) menunjukkan bahwa kepuasan pengguna mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap efektivitas sistem informasi.

Kepuasan pengguna merupakan suatu ukuran dalam keefektifitasan sistem informasi dalam sebuah organisasi. Efektivitas sistem informasi juga memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja penggunanya (Simatupang dan Akib, 2007). Atas dasar uraian tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H4: Kepuasan pengguna memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas sistem informasi.

1.3.5 Model Efektivitas Sistem *E-Procurement*

Pembahasan dalam buku ini menggunakan variabel-variabel kualitas dalam penelitian DeLone dan McLean (2003) untuk mengukur kepuasan pengguna. Selain itu, hubungan antara kepuasan pengguna terhadap efektivitas sistem informasi (*e-Procurement*) dibangun berdasarkan dari model penelitian Gupta et al. (2007). Ilustrasi model yang dimaksud dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Model Efektivitas Sistem *E-Procurement*

1.4 Menguji Efektivitas *E-Procurement*

Pengujian model efektivitas sistem *e-Procurement* dalam buku ini akan diuji menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner. Adapun teknik pengambilan data akan menggunakan metode *convenience sampling*. Metode *convenience sampling* diterapkan untuk menemukan responden potensial yang bersedia menjadi responden (Sekaran, 2006).

Para pengguna (*user*) sistem *e-Procurement* tentunya akan menjadi responden yang tepat untuk menguji model efektivitas sistem *e-Procurement* yang dibahas dalam buku ini. Maka dari itu, penulis menentukan populasinya merupakan lembaga/unit yang telah mengimplementasikan *e-Procurement* guna menunjang kegiatan pengadaan barang dan jasa pada lembaga tersebut. Sehingga, populasi yang tepat guna untuk menguji efektivitas sistem *e-Procurement* dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di sektor publik, khususnya di Indonesia yaitu pengguna dari Sistem Pengadaan Secara

Elektronik (SPSE). SPSE adalah sistem pengadaan berbasis web yang diterapkan pada lembaga sektor publik di Indonesia. Sedangkan sampelnya yaitu karyawan di unit layanan pengadaan bernama Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sleman, Kota Yogyakarta, dan Rumah Sakit Dr. Sardjito. Selain itu, penyedia barang atau jasa di ULP tersebut juga menjadi sampel. Detail terkait dengan responden dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Rincian Jumlah Responden

No.	Responden	Jumlah Responden (Orang)
1.	ULP Provinsi DIY	5
2.	ULP Sleman	6
3.	ULP Kota Yogyakarta	19
4.	ULP RSUP Dr. Sardjito	9
5.	Penyedia Provinsi DIY	2
6.	Penyedia Sleman	8
7.	Penyedia Kota Yogyakarta	14
8.	Penyedia RSUP Dr. Sardjito	9
Total		72

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah responden dari karyawan yang bekerja di ULP Provinsi DIY, Sleman, Kota Yogyakarta dan RSUP Dr. Sardjito sebanyak 39 responden. Sedangkan untuk responden yang berasal dari penyedia barang dan jasa bagi ULP Provinsi DIY, Sleman, Kota Yogyakarta dan RSUP Dr. Sardjito sebanyak 33 responden. Sehingga total respondennya sebanyak 72 responden.

1.4.1 Tinjauan Strategi Analisis Data

Pembahasan dalam buku ini menggunakan *Structural Equation Model (SEM)* untuk menganalisis model efektivitas sistem informasi *e-procurement* yang dibantu dengan aplikasi perangkat lunak *SmartPLS 2.0*. Pendekatan SEM merupakan sekumpulan teknik-teknik statistik yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif kompleks secara simultan. Hubungan yang kompleks tersebut dibangun antara satu atau lebih variabel dependen dengan satu atau beberapa variabel independen. Masing-masing variabel dependen dan independen dapat berbentuk faktor atau konstruk yang dibangun dari berbagai indikator. Analisis jalur ataupun SEM bukan suatu metode untuk mencari penyebab, namun metode yang diaplikasikan untuk model kausal yang diformulasikan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan pengetahuan dan teori (Hair, Black, Babin, dan Anderson, 2010).

1.4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Model Efektifitas Sistem *E-Procurement*

Penelitian ini telah memenuhi syarat atas uji validitas dan reliabilitas (Lihat Lampiran 1). Seperti yang diketahui bahwa uji validitas dilakukan guna mengetahui kemampuan instrumen penelitian dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan uji reliabilitas dilakukan guna menunjukkan akurasi, konsistensi, dan ketepatan alat ukur yang digunakan dalam suatu penelitian (Syahputra, Urumsah, dan Wicaksono, 2017).

Uji validitas terdiri dari dua jenis pengujian, yaitu uji validitas *convergent* dan *discriminant*. Uji validitas *convergent* dapat dipenuhi jika nilai *average variance expected* (AVE) lebih besar dari nilai 0.5, dengan nilai *cross loading* untuk setiap item juga lebih dari 0.5. Sedangkan uji validitas *discriminant* dapat dipenuhi jika akar pangkat dua dari nilai AVE untuk setiap variabel lebih besar dari korelasi terbesar antara variabel tersebut dengan variabel lainnya (Fornell dan Larcker, 1981).

Dalam uji reliabilitas, pengujiannya akan menggunakan nilai dari *composite reliability* (CR) yang dihasilkan. Konstruk dapat dikatakan reliabel (memenuhi syarat uji reliabilitas) jika memiliki nilai CR lebih dari 0.7 (Chin, 1988).

1.4.3 Karakteristik Demografis

Hasil pengujian ini melibatkan 72 responden, yang terdiri dari 39 karyawan yang bekerja di ULP Provinsi DIY, Sleman, Kota Yogyakarta dan RSUP Dr. Sardjito; dan 33 responden yang merupakan penyedia barang dan jasa bagi ULP di Provinsi DIY, Sleman, Kota Yogyakarta, dan RSUP Dr. Sardjito.

Dari keseluruhan responden yang merupakan karyawan dari keempat ULP tersebut, 90% dari karyawan tersebut telah memiliki sertifikat terkait dengan pengadaan. Sedangkan sisanya 10% belum memiliki sertifikat di bidang pengadaan. Selain itu, jika dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas merupakan lulusan Sarjana (S1), dengan tingkat presentasi sebesar 49%. Adapun jika dilihat dari umur, mayoritas berumur lebih dari 40 tahun (tingkat presentasi 62%). Dikarenakan sampelnya berasal dari unit/lembaga sektor publik, tentunya sangat relevan jika respondennya berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan tingkat presentasi 87%.

Pihak penyedia barang dan jasa bagi ULP Provinsi DIY, Sleman, Kota Yogyakarta dan RSUP Dr. Sardjito juga merupakan responden. Dari keseluruhan responden dari penyedia tersebut, 39% merupakan responden yang bekerja di tipe perusahaan pemasok barang. 27% masing-masing berasal dari tipe perusahaan pekerjaan konstruksi; dan pemasok barang dan pekerja

konstruksi. Sisanya (6%) berasal dari tipe perusahaan di bidang jasa konsultasi. Selain itu, frekuensi keikutsertaan pihak penyedia dalam kegiatan *e-Procurement* mayoritas telah dilakukan lebih 5 kali (tingkat presentasi 79%). Dengan lama keikutsertaan dalam kegiatan *e-Procurement* mayoritas lebih dari 1 tahun (tingkat presentasi 82%).

1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas *E-Procurement*

Untuk menunjukkan berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem informasi *e-Procurement*, penulis menggunakan konsep teori **kesuksesan sistem informasi yang** dikenalkan oleh DeLone dan McLean (2003). Sehingga pada akhirnya dapat dilihat tingkat hubungan (secara statistik) berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem informasi *e-Procurement*.

Berdasarkan tinjauan pustaka secara umum, telah dikembangkan 4 hipotesis yang berkaitan dengan efektivitas sistem informasi *e-Procurement*. Hasil analisis dari hipotesis-hipotesis ini secara detail akan dibahas pada bagian ini.

1.5.1 Hipotesis Kualitas Sistem dan Kepuasan Pengguna

Setelah dilakukan pengujian hipotesis pertama atas data responden yang ada, diperoleh hasil bahwa pengujian hipotesis pertama terbukti secara signifikan. Hal tersebut terjadi karena pengaruh kualitas sistem terhadap kepuasan pengguna pada data memiliki nilai t-statistik diatas 1.64, yaitu **1** besar 2.082 dan nilai koefisien positif sebesar 0.213 (Lihat Lampiran 2) yang menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Dari hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa H1 dapat diterima.

Hasil pengujian hipotesis pertama ini, telah menunjukkan bahwa semakin baik kualitas sistem dari *e-Procurement* maka akan semakin meningkatkan kepuasan penggunanya (*user*). Maka dari itu, harapannya hasil ini juga dapat dijadikan referensi bagi para akademisi kedepannya yang ingin melakukan penelitian tentang efektifitas sistem informasi, terutama sistem *e-Procurement*. Hasil hipotesis pertama ini juga telah mendukung dari penelitian yang telah dilakukan oleh Ramdan et al. (2014) dan Saputra (2016).

Melihat hasil dari pengujian hipotesis pertama ini, lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah (LKPP), sebagai organisasi yang ditunjuk untuk mengembangkan *e-Procurement* pada organisasi pemerintah, harus terus menjaga dan memperbaiki kualitas sistem. Sistem teknologi informasi dianggap memuaskan jika memenuhi karakteristik seperti keandalan, navigasi, waktu respon, keamanan sistem, ketersediaan sistem, fungsionalitas, dan transaksi bebas dari kesalahan (Ahn et al, 2004).

1.5.2 Hipotesis Kualitas Informasi dan Kepuasan Pengguna

Setelah dilakukan pengujian hipotesis kedua atas data responden yang ada, diperoleh hasil bahwa pengujian hipotesis kedua terbukti secara signifikan. Hal tersebut terjadi karena pengaruh kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna pada data memiliki nilai t-statistik diatas 1.64, yaitu sebesar 4.049 dan nilai koefisien positif sebesar 0.417 (Lihat Lampiran 2) yang menunjukkan bahwa kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Dari hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa H2 dapat diterima.

Kualitas informasi merupakan salah satu prediktor utama yang menentukan kepuasan pengguna sistem informasi. Hasil dari hipotesis kedua ini telah membuktikan bahwa semakin baik kualitas informasi maka akan semakin meningkatkan kepuasan penggunanya. Sehingga, harapannya hasil ini dapat dijadikan literatur bagi para akademisi kedepannya yang ingin melakukan penelitian serupa. Hasil dari uji ini juga telah mendukung penelitian yang dilakukan oleh Seddon dan Kiew (1996); Livari (2005); Wu dan Wang (2006); dan Saputra (2016).

Melalui hasil dari uji hipotesis kedua ini, harusnya pengelola situs web sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) perlu mengupayakan untuk menyediakan informasi yang lengkap (*completeness*), format yang baik (*format*), informasi yang akurat (*accuracy*), dan terkini (*currency*), untuk membantu pihak yang menggunakan *website* tersebut dalam menunjang pekerjaannya. Jika pengguna dapat memanfaatkan informasi yang disediakan maka pengguna sistem informasi tersebut akan merasa puas.

1.5.3 Hipotesis Kualitas Layanan dan Kepuasan Pengguna

Setelah dilakukan pengujian hipotesis ketiga atas data responden yang ada, diperoleh hasil bahwa pengujian hipotesis ketiga terbukti secara signifikan. Hal tersebut terjadi karena pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pengguna pada data memiliki nilai t-statistik diatas 1.64, yaitu sebesar 2.290 dan nilai koefisien positif sebesar 0.326 (Lihat Lampiran 2) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Dari hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa H3 dapat diterima.

Hasil pengujian hipotesis yang ketiga ini, telah membuktikan bahwa kualitas layanan yang semakin baik, akan membuat para pengguna sistem *e-Procurement* semakin puas. Maka dari itu, peneliti selanjutnya dapat menjadikan hasil ini sebagai referensi kedepannya bagi mereka yang ingin melakukan penelitian serupa. Hasil hipotesis ketiga ini juga telah mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Wang dan Tang (2003); Setyaningsih (2014); dan Saputra (2016).

Pihak Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) selaku pengelola sistem pengadaan secara elektronik di organisasi pemerintah Indonesia perlu memperhatikan kualitas pelayanan yang dirasakan pengguna *website* SPSE, yaitu unit layanan pengadaan (ULP) atau perusahaan penyedia barang/jasa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi yang berorientasi pada kepuasan penggunanya. Konsep kualitas pelayanan merupakan tahapan dimana pihak LPSE berinteraksi dengan pengguna situs web SPSE sebagai suatu bentuk pelayanan interpersonal.

1.5.4 Hipotesis Kepuasan Pengguna Efektivitas *E-Procurement*

Setelah dilakukan pengujian hipotesis keempat atas data responden yang ada, diperoleh hasil bahwa pengujian hipotesis keempat terbukti secara signifikan. Hal tersebut terjadi karena pengaruh kepuasan pengguna terhadap efektivitas sistem informasi *e-Procurement* pada data memiliki nilai t-statistik diatas 1.64, yaitu sebesar 6.541 dan nilai koefisien positif sebesar 0.620 (Lihat Lampiran 2) yang menunjukkan bahwa kepuasan pengguna berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem informasi *e-Procurement*. Dari hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa H4 dapat diterima.

Hasil dari pengujian hipotesis terakhir ini telah menunjukkan bahwa kepuasan pengguna dapat meningkatkan efektifitas penggunaan sistem informasi *e-Procurement*. Maka dari itu, para akademisi dapat menjadikan hasil ini sebagai referensi kedepannya bagi mereka yang ingin melakukan penelitian serupa. Hasil dari hipotesis keempat ini juga telah mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Gupta et al. (2007); dan Saputra (2016).

Suatu sistem informasi dianggap memuaskan oleh penggunanya apabila penggunaan sistem informasi tersebut dapat bermanfaat dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Sistem informasi yang efektif dapat diukur dengan peningkatan efektivitas dalam menyelesaikan pekerjaan, meningkatkan pembuatan keputusan, meningkatkan tanggung jawab, dan meningkatkan kinerja divisi dimana pengguna sistem informasi tersebut bekerja. Maka dari itu, layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) selaku pengelola sistem pengadaan secara elektronik di organisasi pemerintah Indonesia perlu sekali memperhatikan hal-hal yang dapat meningkatkan kepuasan penggunanya dalam menggunakan sistem *e-Procurement*, seperti dengan meningkatkan kualitas sistemnya, informasinya dan pelayanannya.

1.6 Kesimpulan

Pembahasan dalam buku ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepuasan pengguna terhadap efektivitas sistem *e-Procurement*, khususnya pada lembaga

sektor publik. Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan dibuktikan bahwa bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Artinya semakin tinggi kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas pelayanan, maka kepuasan pengguna juga akan meningkat. Selain itu, juga dibuktikan bahwa kepuasan pengguna berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas sistem informasi *e-Procurement*. Hal ini telah menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan pengguna, maka efektivitas sistem informasi *e-Procurement* juga akan semakin tinggi pula. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi SI berbasis teknologi seperti *e-Procurement* pada organisasi pemerintah Indonesia telah memenuhi salah satu dari tujuannya; Membuat pengadaan barang atau jasa menjadi lebih efektif daripada proses manual. Efektivitas sistem elektronik ini juga dapat memperbaiki kekurangan dalam sistem pengadaan pada organisasi pemerintah sebelumnya sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat ditingkatkan atau meningkat.

1.6.1 Kontribusi dan Implikasi

Hasil dari pengujian ini, memberikan kontribusi teori dengan membuktikan bahwa kepuasan pengguna dapat meningkatkan efektifitas *e-Procurement*. Selain itu, hasil dari pengujian dalam buku ini juga telah membuktikan bahwa semakin baik kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas pelayanan *e-Procurement* dapat meningkatkan kepuasan para penggunanya. Maka dari itu, melalui hasil ini para akademisi dapat menjadikannya sebagai tambahan referensi kedepannya bagi mereka yang ingin melakukan penelitian di bidang efektifitas SI, terutama *e-Procurement*.

Temuan ini juga memiliki beberapa implikasi bagi pemerintah. Pertama, pengembang dari sistem *e-Procurement* pada organisasi pemerintah Indonesia yaitu LKPP diharapkan terus berinovasi terhadap sistem *e-Procurement* agar lebih baik sehingga tujuan implementasi dari sistem ini dapat tercapai. Misalnya dengan membuat tampilan sistem *e-Procurement* menjadi lebih *user friendly*, sederhana, kemudahan penggunaan dan mudah dipahami serta mudah digunakan oleh penggunannya. Kedua, bagi pihak yang mengelola dan mengoperasikan sistem *e-Procurement* di Indonesia, yaitu LPSE, diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi dan kualitas layanan yang baik kepada pengguna situs web SPSE guna untuk meningkatkan kepuasan penggunannya. Misalnya lengkap dan detailnya informasi dalam sistem *e-procurement*, dan informasi yang disampaikan komplit, akurat, terkini, dan formatnya yang baik. Selain itu, LPSE perlu mengenalkan sistem *e-Procurement* kepada lebih banyak vendor sehingga permintaan barang dan jasa dapat selalu terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

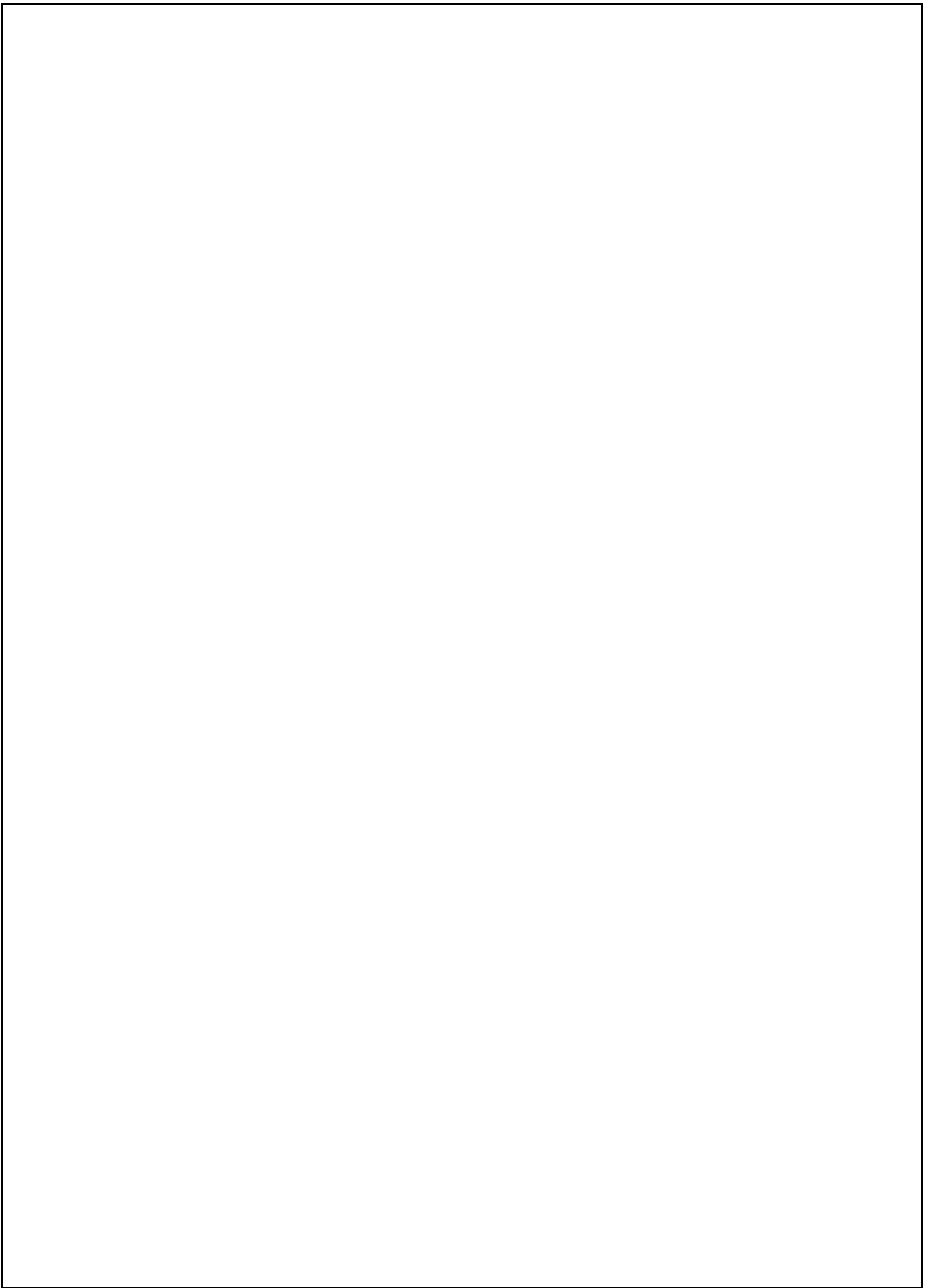
- Ahn, T., Ryu, S., & Han, I. (2004). The Impact of the Online and Offline Features on the User Acceptance of Internet Shopping Malls. *Electronic Commerce Research and Applications*, 3(4), 405–420.
- Bailey, J. E., & Pearson, S. W. (1983). Development of A Tool for Measuring and Analyzing Computer User Satisfaction. *Management Science*, 29(5), 530–545.
- Chin, W. W. (1988). *The Partial Least Square Approach for Structural Equation Modeling*. in G.A. Marcoulides (Ed.), *Modern Methods for Business Research*. London: Lawrence Erlbaum Associates.
- Croom, S., & Johnston, R. (2003). E-Service: Enhancing Internal Customer Service Through E-Procurement. *International Journal of Service Industry Management*, 14(5), 539–555.
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (1992). Information System Success: The Quest for the Dependent Variable. *Information System Research*, 3(1), 60–95.
- _____. (2003). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. *Jurnal Management Information System*, 19(4), 9–30.
- Doll, W. J., & Torkzadeh, G. (1988). The Measurement of End-User Computing Satisfaction. *MIS Quarterly*, 12(2), 259–274.
- 1 Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39–50.
- Gefen, D. (2002). Customer Loyalty in E-Commerce. *Journal of Association for Information Systems*, 3(1), 27–51.
- Guimares, T., Staples, D. S., & McKeen, J. D. (2003). Empirically Testing Some Main User-Related Factor for Systems Development Quality. *Quality Management Journal*, 10(4), 39–54.
- Gupta, M. P., Kanungo, S., Kumar, R., & Sahu, G. P. (2007). A Study of Information Technology Effectiveness in Select Government Organizations in India. *Journal of Decision Makers*, 32(2), 7–21.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis* (7 ed.). New Jersey: Pearson Education.
- Handayani, R. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Menentukan Efektivitas Sistem Informasi pada Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 26–40.

- Istianingsih, & Utami, W. (2008). Pengaruh Kualitas Sistem Informasi, Perceived Usefulness, dan Kualitas Informasi terhadap Kepuasan Pengguna Akhir Software Akuntansi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 50–76.
- Ives, B., & Olson, M. H. (1984). User Involvement and MIS Success: A Review of Research. *Management Science*, 30(5), 586–603.
- Jonathan, H. (2013). Analisis Pengaruh E-Service Quality terhadap Customers Satisfaction yang Berdampak pada Customer Loyalty PT Bayu Buana Travel TBK. *Journal The Winners*, 14(2), 104–112.
- KPK. (2017). Laporan Tahunan KPK Tahun 2016. Diambil 9 September 2017, dari [https://www.kpk.go.id/images/Laporan Tahunan KPK 2016 Bahasa Indonesia.pdf](https://www.kpk.go.id/images/Laporan_Tahunan_KPK_2016_Bahasa_Indonesia.pdf)
- Landrum, H. T., Prybutok, V. R., Strutton, D., & Zhang, X. (2008). Examining the Merits of Usefulness Versus Use in an Information Service Quality and Information System Success Web-Based Model. *Information Resources Management Journal*, 21(2), 1–17.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2007). *Sistem Informasi Manajemen: Mengelola Perusahaan Digital* (10 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Livari, J. (2005). An Empirical Test of the DeLone-McLean Model of Information Systems Success. *The Database for Advances in Information Systems*, 26(2), 8–27.
- MacManus, S. A. (2002). Understanding the Incremental Nature of E-Procurement Implementation at the State and Local Levels. *Journal of Public Procurement*, 2(1), 5–28.
- Mardikawati, W., & Farida, N. (2013). Pengaruh Nilai Pelanggan dan Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Pelanggan, Melalui Kepuasan Pelanggan pada Pelanggan Bus Efisiensi (Studi PO Efisiensi Jurusan Yogyakarta-Cilacap). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2(1), 64–75.
- Ompusunggu, H. (2002). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 1–9.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. M. J. B., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Customer Perceptions of Service Quality. *Journal of Retailing*, 64(4), 20–50.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Malhotra, A. (2005). E-S-QUAL: A Multiple-Item Scale for Assessing Electronic Service Quality. *Journal of Service Research*, 3(X), 1–21.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Presiden Republik Indonesia*. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta.
- Rahmawati, D. (2010). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Pelayanan Pegawai Administrasi dan Pengaruh Kualitas Pelayanan Pegawai Administrasi terhadap Kepuasan Mahasiswa di Lingkungan FISE UNY. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 8(2), 18–32.
- Ramdan, S. M. A., Azizan, Y. N. B., & Saadan, K. B. (2014). E-Government System Success Evaluating Under Principle Islam: A Validation of Delone and Mclean of Islamic Information System Success. *Academic Researh*, 5(2), 72–85.
- Rizki, Y. A., Suroso, A. I., & Ramadhan, A. (2016). Evaluasi Tata Kelola Sistem Informasi Business Intelligence pada Perusahaan Minuman Ringan. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 15(3), 279–296.
- Saputra, A. B. (2016). Identifikasi Faktor-Faktor Keberhasilan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 19(3), 135–148.
- Seddon, P. B. (1997). A Respesification and Extension of the DeLone and McLean Model of IS Success. *Information System Research*, 8(3), 240–253.
- Seddon, P. B., & Kiew, M. Y. (1996). A Partial Test and Development of DeLone and McLean's Model of IS Success. *Australian Journal of Information Systems*, 4(1), 90–109.
- Sekaran, U. (2006). *Metode Penelitian untuk Bisnis* (4 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Setyaningsih, O. (2014). Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan E-Commerce terhadap Kepuasan Pelanggan, Kepercayaan dan Loyalitas Pada Produk Fashion. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 14(2), 67–80.
- Simatupang, P., & Akib, H. (2007). Potret Efektivitas Organisasi Publik: Review Hasil Penelitian. *Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia*, 36(1), 35–41.
- Sofian, S., Ilat, V., & Wokas, H. (2013). Persepsi Pengguna pada Penerapan Lelang Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Salah Satu Wujud Peningkatan Kualitas Good Governance di Kementerian Agama Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 4(2), 37–73.

- Subramaniam, C., Qualls, W., & Shaw, M. (2003). *Impact of B2B E-Procurement Systems-A Summary Report*. Illinois.
- Supriyono, R. A. (2000). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Susanty, M. (2013). Pengujian Model DeLone dan McLean dalam Pengembangan Sistem Informasi IFCA. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 15(2), 142–450.
- Syahputra, B. E., Urumsah, D., & Wicaksono, A. P. (2017). Dampak Gender dalam Niat Melakukan Whistle-Blowing: Analisis Multigrup. *Simposium Nasional Akuntansi XX*, 1–20.
- Udoyono, K. (2012). E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 5(1), 135–171.
- Urumsah, D. (2014). *Perencanaan Strategis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Data Algonia.
- Urumsah, D. (2015). Factors Influencing Consumers to Use E-Services in Indonesian Airline Companies. In *Mohammed Quaddus, Arch G. Woodside (ed) E-Services Adoption: Processes by Firms in Developing Nations (Advances in Business Marketing and Purchasing, Volume 23 B)* (hal. 5–254). Emerald Group Publishing Limited.
- Vaidya, K., Sajeev, A. S. M., & Callender, G. (2006). Critical Factors that Influence E-Procurement Implementation Successes in the Public Sector. *Journal of Public Procurement*, 6(1 & 3), 70–99.
- Wang, Y. S., & Tang, T. I. (2003). Assessing Customer Perceptions of Website Service Quality in Digital Marketing Environments. *Journal of End User Computing*, 15(3), 14–31.
- Wirtz, B. S., Lutje, & Schierz, P. G. (2010). An Empirical Analysis of the Acceptance of E-Procurement in the German Public Sector. *International Journal of Public Administration*, 33(1), 26–42.
- Wu, J. H., & Wang, Y. M. (2006). Measuring KMS Success: A Respecification of the DeLone and McLean's Model. *Elseiver: Information and Management*, 43(6), 728–739.
- Yuwinanto, H. P. (2013). Implementasi E-Procurement pada Pemerintah Kota Surabaya. *Jejaring Administrasi Publik*, 4(1), 212–231.

LAMPIRAN



Lampiran 1 – Evaluasi Pengukuran (*Outer Model*)

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 1. Nilai *Item Loadings* dan *Average Variance Extracted* (AVE) Akhir

No	Variabel	Item Pertanyaan	Kode	Loading	AVE
1	Kualitas Sistem (KS)	Situs web SPSE memiliki desain yang baik	KS1	0.851	0.656
		Situs web SPSE memiliki navigasi yang mudah	KS2	0.883	
		Situs web memiliki waktu respon yang cepat	KS3	0.831	
		Situs web SPSE aman dari penyalahgunaan sistem	KS4	0.806	
		Saya dapat mengakses situs web SPSE kapanpun saya membutuhkannya selama jam kerja	KS5	0.820	
		Situs web SPSE memiliki fungsi yang baik	KS6	0.879	
		Situs web SPSE bebas dari error	KS7	0.551	
2	Kualitas Informasi (KI)	Informasi yang terdapat di situs SPSE lengkap	KI1	0.734	0.709
		Informasi yang terdapat di situs web SPSE relevan dengan pekerjaan saya	KI2	0.695	
		Informasi yang terdapat di situs web SPSE ditata dengan baik	KI3	0.837	
		Informasi yang terdapat di situs web SPSE disajikan dengan jelas	KI4	0.923	
		Informasi yang terdapat di situs web SPSE tidak menyesatkan	KI5	0.918	
		Informasi yang terdapat di situs web SPSE selalu terkini	KI6	0.915	
3	Kualitas Layanan (KL)	Saat saya mengalami masalah pada situs web SPSE, pihak LPSE dapat diandalkan	KL1	0.852	0.658
		Saat saya mengalami masalah pada situs web SPSE, pihak LPSE bersungguh-sungguh dalam membantu saya	KL2	0.915	
		Saat saya mengalami masalah pada situs web SPSE, pihak LPSE merespon keluhan saya dengan cepat	KL3	0.827	
		Pihak LPSE memberikan pelayanan sesuai dengan waktu yang mereka janjikan	KL4	0.828	
		Pihak LPSE memberikan pelayanan yang cepat	KL5	0.905	
		Saat saya mengalami masalah pada situs web SPSE, pihak LPSE selalu siap membantu saya	KL6	0.779	
		Pihak LPSE mempunyai pengetahuan yang cukup untuk menjawab permasalahan saya	KL7	0.644	
		Pihak LPSE mempunyai pegawai yang memberikan saya perhatian personal selaku pengguna situs web SPSE	KL8	0.695	
4	Kepuasan Pengguna (KP)	Terkait dengan tanggung jawab yang saya miliki selaku pengguna akhir maka sistem pengadaan melalui situs web SPSE yang diterapkan saat ini demikian efisien	KP1	0.959	0.924
		Sistem pengadaan melalui situs web SPSE yang diterapkan saat ini demikian efektif	KP2	0.969	
		Secara keseluruhan, saya puas dengan situs web SPSE	KP3	0.955	

Tabel 1. Nilai *Item Loadings* dan *Average Variance Extracted* (AVE) Akhir (Lanjutan)

5	Efektifitas Sistem <i>E-Procurement</i> (ES)	Sistem pengadaan melalui situs web SPSE mempunyai dampak terhadap keefektivan dan produktifitas pekerjaan saya dibandingkan dengan cara manual	ES1	0.915	0.890
		situs web SPSE meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang harus saya buat	ES2	0.951	
		situs web SPSE dapat meningkatkan tanggung jawab saya pada pekerjaan	ES3	0.955	
		situs web SPSE secara keseluruhan dapat meningkatkan kinerja divisi dimana saya bekerja	ES4	0.952	

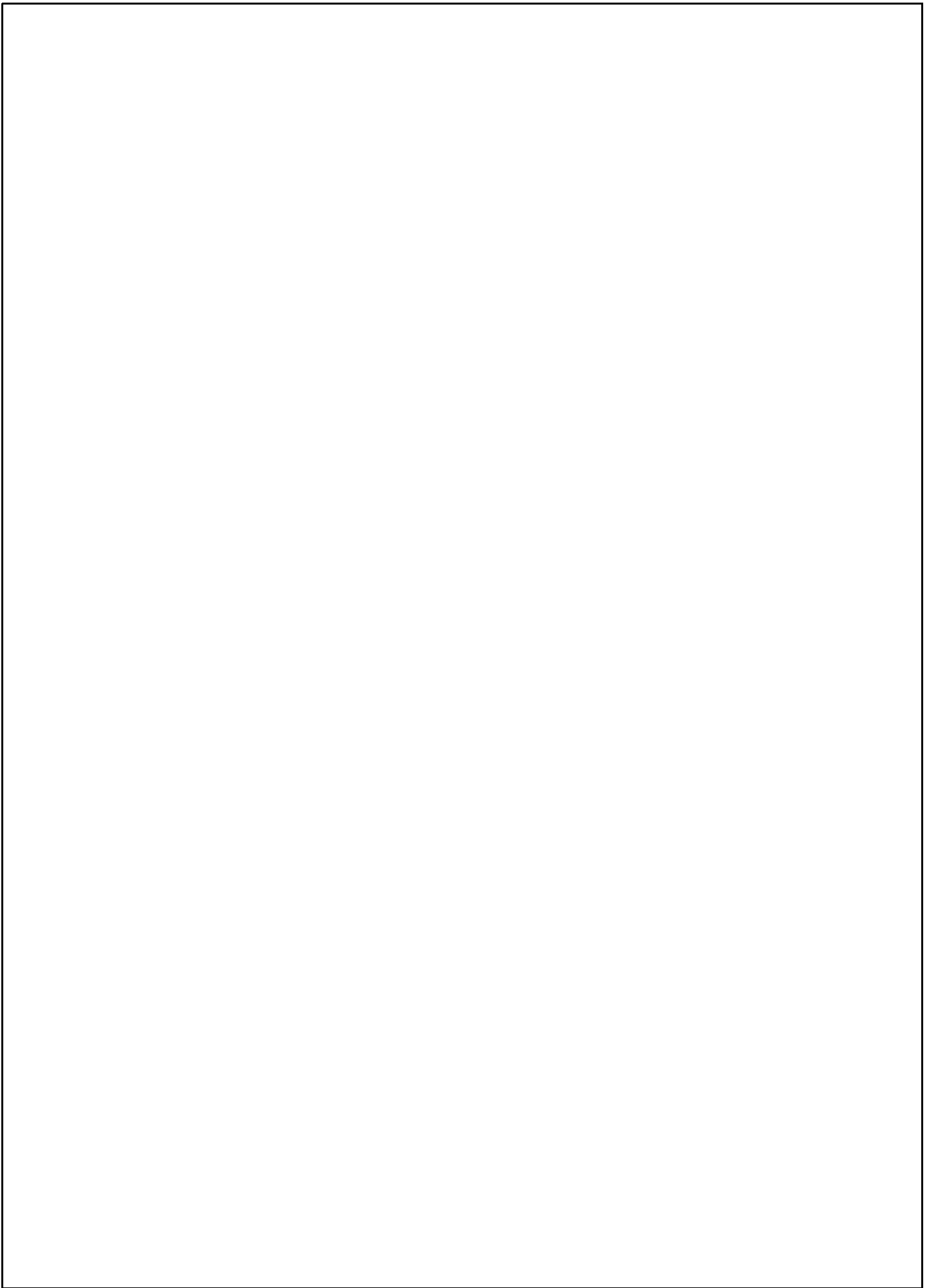
Tabel 2. Nilai *Composite Reliability* (CR), *Correlation of Latent Variables*, dan *Square Roots of AVE*

	CR	KS	KI	KL	KP	ES
KS	0.969	0.943				
KI	0.935	0.494	0.842			
KL	0.973	0.639	0.712	0.961		
KP	0.938	0.445	0.632	0.682	0.810	
ES	0.929	0.481	0.372	0.519	0.467	0.809

Lampiran 2 – Penilaian *Inner Model*

Tabel 3. Pengujian Hipotesis

Hipotesis	<i>Path</i>	<i>Path coefficients (mean of subsample)</i>	<i>t-Value for path</i>
H1	KS → KP	0.213	2.082
H2	KI → KP	0.417	4.049
H3	KL → KP	0.326	2.290
H4	KP → ES	0.620	6.541



BAB 2

FAKTOR-FAKTOR PENCEGAHAN *FRAUD* : PERANAN *E-PROCUREMENT*

Meningkatnya tindakan *fraud* saat ini tentunya selalu membuat berbagai pihak selalu merasa khawatir. *Fraud* yang terjadi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu jenis *fraud* yang cukup sering terjadi di berbagai Negara, termasuk di Indonesia. Berbagai upaya selalu dilakukan untuk mengetahui metode ataupun cara yang efektif guna mencegah tindakan *fraud* tersebut. Implementasi sistem informasi seperti *e-Procurement* pada berbagai jenis organisasi pada saat ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah tindakan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa. Namun, tentunya tetap perlu dikaji kembali faktor-faktor lainnya yang dapat mencegah tindakan *fraud* tersebut, sehingga tindakan *fraud* tersebut dapat diminimalisir.

2.1. Mencegah *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa merupakan aktivitas pemerintah yang paling signifikan, tidak hanya dari tingkat aktivitas tetapi juga dana yang dialokasikan (Moon, 2005). Pengadaan barang dan jasa yang saat ini berlaku, khususnya di Indonesia masih memiliki kelemahan dan belum secara efektif mampu mencegah terjadinya korupsi. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diatur oleh Pemerintah Indonesia, masih memungkinkan bagi Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan tindakan *fraud* berupa korupsi di setiap tahapannya. Data yang diperoleh dari laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tahun 2016, korupsi yang terjadi terkait dengan pengadaan barang dan jasa masih tergolong sebagai salah satu kasus korupsi tertinggi yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil

rekapitulasi kasus korupsi yang ditangani KPK dari tahun 2004-2016, telah terjadi 148 kasus korupsi yang terjadi terkait dengan pengadaan barang dan jasa (KPK, 2017).

Sebelum adanya penerapan sistem informasi berbasis teknologi seperti *e-Procurement*, proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara konvensional, yaitu langsung mempertemukan pihak-pihak terkait dalam pengadaannya. Pada pelaksanaan pengadaan secara konvensional dapat memunculkan berbagai penyimpangan dalam berbagai bentuk seperti pengaturan spesifikasi tender, favoritisme pemenang maupun penurunan kualitas demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, pengadaan yang dilakukan secara konvensional dinilai memiliki beberapa kelemahan yang banyak merugikan, dan bersifat kurang transparan, bahkan menjadi salah satu sumber korupsi terbesar yang terjadi dalam sektor keuangan publik (Tuanakotta, 2010; dan Wulandari, El Unas, dan Hasyim, 2014).

Pengadaan barang dan jasa di organisasi pemerintahan telah melewati sejarah panjang dan berbagai bentuk penyimpangan yang telah teridentifikasi, diantaranya yaitu: (a) pengadaan secara arisan dan adanya *kick-back* selama proses pengadaan; (b) melakukan suap untuk memenangkan pengadaan; (c) proses pengadaan yang tidak transparan; (d) pengelola proyek tidak mengumumkan rencana pengadaan; (e) pemasok mematok harga yang lebih tinggi (*mark-up*); (f) memenangkan perusahaan saudara, kerabat, atau kelompok tertentu; (g) tidak membuka akses bagi peserta dari daerah sekitarnya; (h) mencantumkan spesifikasi teknis yang hanya dapat dipasok oleh satu pelaksana usaha tertentu; (i) adanya pemasok yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi namun tetap dapat ikut pengadaan dan bahkan menang; dan (j) menggunakan metoda pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah yang tidak seharusnya untuk mencapai maksud tertentu seperti menggunakan metoda penunjukan langsung dengan tidak menghiraukan ketentuan yang telah ditetapkan (Suchyo dan Ruldeviyani, 2009).

Untuk mengatasi segala persoalan penyimpangan tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai revisi Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut pemerintah bersama dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah) membuat suatu sistem baru untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-Procurement*). Adapun LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) sebagai pihak yang menjadi mediator antara penyedia barang dan jasa (rekanan) dan pihak pengguna (instansi pemerintah), serta sebagai pengelola sistem *e-Procurement*.

Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan pengadaan barang dan jasa bisa berjalan lancar bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme. Pengadaan secara elektronik membantu pemerintah menghemat uang dan menyediakan cara yang lebih akuntabel, efektif, dan cepat untuk mengelola pengadaan (Gunasekaran dan Ngai, 2008). Dan yang terpenting sistem *e-Procurement* dapat membantu dalam peningkatan tata kelola untuk mencapai *good corporate governance*. Dengan diterapkannya *e-Procurement* tersebut diharapkan potensi kecurangan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat diminimalisir.

2.1.1 Sekilas Hubungan *E-Procurement* (Teknologi), Pengendalian Internal (Organisasi), Audit Internal (Organisasi) dan Kualitas SDM terhadap *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

E-Procurement merupakan pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (Jasin, Zulaiha, Rachman, dan Ariati, 2007). Dengan *e-Procurement* peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan biaya, serta dalam pelaksanaannya mudah untuk melakukan pertanggung jawaban keuangan.

Namun, di setiap kesuksesan penerapan sistem yang baru pasti melibatkan sumber daya manusia yang ahli di bidangnya. Maka dari itu perlu diketahui pula faktor lainnya yang juga efektif untuk mencegah *fraud* pengadaan barang dan jasa. Faktor lainnya yang dianggap efektif untuk mencegah terjadinya suatu *fraud* ialah dengan memaksimalkan pemanfaatan pengendalian internal dan audit internal (organisasi); serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) seperti menanamkan kesadaran terkait bahayanya *fraud* dan upaya untuk menghentikannya (Tuanakotta, 2010; Peters, 1999; Barnes, 1995; dan Calderon dan Green, 1994).

Pengendalian internal (PI) dapat dianggap sebagai suatu kebijakan dan prosedur yang dibuat guna untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Pengendalian internal apabila dimaksimalkan dalam prosesnya dapat digunakan untuk mencegah *fraud* pada proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini dikarenakan dalam prosesnya, PI akan selalu mengevaluasi dan memastikan bahwa tidak terdapat celah dan kelemahan yang dapat memungkinkan *fraud* dapat terjadi. Selain itu melalui PI, proses pendeteksian *fraud* dalam suatu organisasi akan menjadi lebih baik (Joseph, Albert, dan Byarahanga, 2015; dan Hermiyetti, 2011).

Keberadaan audit internal dalam suatu organisasi adalah sebagai bentuk kontrol perusahaan untuk mencegah adanya penipuan dan penyimpangan yang mungkin akan terjadi (Monisola, 2013). Hal ini dikarenakan, audit internal akan

dimanfaatkan untuk meninjau dan mengendalikan serta mengukur proses pengendalian internal. Sehingga apabila audit internal dimaksimalkan, maka proses pengendalian internal akan menjadi efektif dan hal ini akan membuat semakin kecilnya kemungkinan *fraud* dapat terjadi (Emmanuel dan Usman, 2015; Mohamud, 2013; dan Soeharmoro, 2012).

Meningkatkan kualitas SDM perusahaan juga merupakan faktor yang efektif untuk mencegah *fraud*, termasuk *fraud* pengadaan barang dan jasa. Bentuk peningkatan kualitas SDM ini dapat melalui beberapa cara, seperti meningkatkan kesadaran karyawan terhadap peraturan melalui berbagai pelatihan yang positif. Kurangnya kesadaran karyawan terhadap suatu peraturan yang tidak mereka sukai akan membebani mereka dalam bekerja dan membuat mereka mengalami banyak kesulitan. Dan hal ini pula yang terkadang mendorong si karyawan melakukan tindakan *fraud* (Khana dan Arora, 2009).

2.2 Konsep Metode Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Dampak yang diakibatkan karena adanya tindakan *fraud* akan sangat merugikan bagi setiap organisasi. Maka dari itu perlu diketahui berbagai faktor efektif yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya *fraud* tersebut, terutama *fraud* pada kegiatan pengadaan barang dan jasa. Mengingat tingginya *fraud* yang terjadi pada proses tersebut. Sehingga, tentunya perlu sekali diketahui tinjauan literatur terkait dengan konsep *fraud* dan berbagai faktor yang dapat mencegah terjadinya *fraud*. Tinjauan literatur tersebut akan dibahas pada bagian ini.

2.2.1 *Fraud*

2.2.1.1 Konsep *Fraud*

Fraud ialah suatu aktivitas yang terjadi pada suatu lingkungan sosial yang mempunyai berbagai konsekuensi yang berat pada ekonomi, perusahaan, dan individu (Urumsah, Wicaksono, dan Pratama, 2016). Secara umum *fraud* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *extenal* dan *internal fraud*. *Extenal fraud* merupakan *fraud* yang dilakukan oleh seseorang yang berasal dari luar organisasi. Sedangkan *internal fraud* ialah sebaliknya. *Fraud* ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak internal suatu organisasi seperti staf, manajer dan pihak-pihak eksekutifnya (Aji dan Urumsah, 2016). Selain itu, jika dilihat lebih detail, *fraud* dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok antara lain: (a) korupsi, terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*); (b) penyalahgunaan aset, dapat digolongkan ke dalam kecurangan

kas dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*); Dan (c) kecurangan laporan keuangan, dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat *financial* atau kecurangan *non financial* (ACFE, 2014).

2.2.1.2 Penyebab *Fraud*

Penyebab seseorang melakukan *fraud* biasanya dikarenakan 3 faktor atau penyebab. Ketiga penyebab *fraud* tersebut biasa disebut dengan istilah *fraud triangle*, yaitu kesempatan (*opportunity*), tekanan atau insentif (*pressure or incentive*) dan rasionalisasi (*rationalization*) (Cressey, 1953). Namun, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa masih terdapat satu faktor lagi yang sangat berpotensi dalam mendorong seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*. Faktor tersebut yaitu kemampuan (*capability*). Hal ini dikarenakan sifat-sifat pribadi dan kemampuan yang memainkan peran utama apakah suatu *fraud* mungkin benar-benar dapat terjadi bahkan dengan kehadiran tiga unsur lainnya. Keempatnya saling mendukung sama lain dan membentuk pilar kecurangan yang disebut sebagai *fraud diamond* (Wolfe dan Hermanson, 2004).

Elemen pertama dari *fraud diamond* adalah tekanan. Tekanan dapat diakibatkan oleh berbagai hal termasuk tekanan yang bersifat finansial dan non finansial. Faktor finansial muncul karena keinginan untuk memiliki gaya hidup yang berkecukupan secara materi. Sedangkan faktor non finansial bisa mendorong seseorang melakukan *fraud*, yaitu tindakan untuk menutupi kinerja yang buruk (Wolfe dan Hermanson, 2004). Elemen kecurangan yang kedua adalah kesempatan. Terbukanya kesempatan ini dikarenakan si pelaku percaya bahwa aktivitas mereka tidak akan terdeteksi. Bahkan andaikan aksi seseorang itu diketahui, maka tidak ada tindakan yang serius yang akan diambil. Peluang ini terjadi biasanya terkait dengan lingkungan dimana kecurangan memungkinkan untuk dilakukan (Urumsah et al., 2016).

Elemen ketiga dalam tindakan kecurangan adalah rasionalisasi. Hal ini merupakan pembenaran terhadap tindakan yang dilakukan. Para pelaku *fraud* biasanya mencari berbagai alasan secara rasional untuk menjustifikasi tindakan mereka (Urumsah et al, 2016; dan Sukirman dan Sari, 2013). Elemen keempat dalam tindakan kecurangan adalah kemampuan (*Capability*). Posisi, kecerdasan, ego, pemaksaan, penipuan, dan stres, adalah elemen pendukung kemampuan (Wolfe dan Hermanson 2004). Unsur ini sangat penting ketika menyangkut penipuan skala besar atau jangka panjang. Selain itu, orang yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi akan dapat memahami pengendalian internal yang ada, untuk mengidentifikasi kelemahan dan untuk menggunakannya dalam perencanaan pelaksanaan penipuan (Albrecht, Williams, dan Wernz, 1995).

2.2.2. Konsep Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan gabungan dari teknologi, organisasi dan sumber daya manusia (Pearlson, 2001). Melalui sistem informasi *fraud* dapat dicegah. Untuk melihat bagaimana pengaruh sistem informasi dalam pencegahan *fraud* maka dipilih beberapa variabel yang dapat mewakili sistem informasi dalam kaitannya untuk mencegah *fraud*. Dalam penelitian ini teknologi akan diwakili oleh variabel *e-Procurement*. Kemudian untuk organisasi akan diwakili oleh variabel pengendalian internal dan audit internal. Sedangkan untuk sumber daya manusia akan diwakili oleh tiga variabel yaitu (a) pelatihan yang efektif; (b) sikap positif terhadap aturan; dan (c) tingkat kesadaran terhadap kecurangan.

2.2.2.1 Teknologi (*E-Procurement*)

E-Procurement merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik atau *Electronic Data Interchange* (Willem, 2012). Pada intinya, *e-Procurement* merupakan sebuah rangkaian proses transaksi secara elektronik (*otomatis*) yang terjadi antara pembeli dan penjual yang dilakukan melalui medium elektronik atau Internet (Wibawa, 2011; dan Croom dan Jones, 2007).

Pengadaan secara elektronik menggunakan Internet seperti *e-Procurement* dapat digunakan untuk menghemat biaya, mengubah rutinitas pembelian, mengurangi waktu pengadaan, dan membangun hubungan dengan pemasok (Rotchanakitumnuai, 2013). Tentunya hal ini dapat berlaku bagi semua jenis organisasi, tidak terkecuali pada lembaga sektor publik/pemerintah. Sistem pengadaan pemerintah secara elektronik bisa meningkatkan transparansi dan bisnis perubahan tata praktek dan mendorong baru pemasok atau vendor untuk berpartisipasi dalam pengadaan publik (Harris dan Rajora, 2006).

Fasilitas teknologi komunikasi dan informasi dalam sistem *e-Procurement* terdiri dari: (a) *e-Tendering*, ialah tata cara pemilihan penyedia barang dan jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan; (b) *e-Catalogue*, ialah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari penyedia barang dan jasa pemerintah; dan (c) *e-Purchasing*, ialah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik (Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010).

2.2.2.2 Organisasi

Adanya dukungan dan komitmen organisasi yang senantiasa untuk mencegah *fraud* ialah cara terbaik organisasi tersebut agar dapat meminimalisir tindakan

fraud. Bentuk dukungan dan komitmen tersebut dapat dengan memaksimalkan dan mendukung proses pengendalian internal dan audit internal.

2.2.2.2.1 Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk melindungi aset suatu organisasi dari tindakan penyalahgunaan, memastikan keakuratan informasi, dan untuk memastikan bahwa perundang-undangan dan peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya. Selain itu melalui pengendalian internal sebuah organisasi dapat dengan mudah untuk mengarahkan kegiatan operasional dan mencegah adanya penyalahgunaan sistem (Naibaho, 2013).

Pengendalian internal menyediakan suatu struktur dalam mempertimbangkan banyak kemungkinan pengendalian yang berhubungan dengan pencapaian tujuan entitas. Terdapat lima komponen pengendalian internal yang saling berhubungan antara lain: (a) lingkungan pengendalian menetapkan suasana suatu organisasi, yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian internal yang lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur; (b) penilaian risiko (*risk assessment*) merupakan pengidentifikasian dan analisis entitas mengenai risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan entitas yang membentuk suatu dasar mengenai bagaimana resiko dikelola; (c) aktivitas pengendalian (*control activity*) merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan; (d) informasi dan komunikasi (*information and communication*) merupakan pengidentifikasian, pengungkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawabnya; dan (e) pemantauan (*monitoring*) merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian internal pada suatu waktu (Committee of Sponsoring Organizations of Teadway Commission, 1992).

2.2.2.2.2 Audit Internal

Audit internal adalah satu bentuk upaya yang dilakukan guna mencegah terjadinya berbagai tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan aset suatu organisasi, sehingga dalam prosesnya diperlukan auditor-auditor yang kompeten (Salsabika dan Prayudiawan, 2011). Selain itu, audit internal merupakan aktivitas yang bersifat independen dan sebagai wadah konsultasi yang dirancang untuk meningkatkan operasional suatu organisasi. Melalui audit internal, suatu organisasi dapat dengan mudah untuk mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk senantiasa mengevaluasi dan

meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi (Yuliani, Nadirsyah, dan Bakar, 2010).

Ruang lingkup audit internal yang modern menggambarkan pilihan yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda dalam suatu organisasi untuk menentukan: (a) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (b) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (c) peraturan dari eksternal dan kebijakan serta prosedur internal yang bias diterima telah diikuti; (d) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (e) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (f) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif (Sawyer, 2005).

2.2.2.3 Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas sumber daya manusia (SDM) dapat diwujudkan dalam beragam cara. Peningkatan kualitas SDM yang berkaitan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya *fraud* dapat dilakukan melalui pelatihan yang efektif, sikap positif terhadap aturan dan keadaran terhadap kecurangan.

2.2.2.3.1 Pelatihan yang Efektif

Kondisi kritis yang sering dialami organisasi terkait dengan rendahnya kualitas SDM biasanya diakibatkan karena suatu pimpinan dari organisasi tersebut jarang bahkan tidak memberikan berbagai pelatihan yang sifatnya efektif. Pelatihan yang tidak efektif yang dimaksud yaitu pelatihan terkadang diberikan tidak sesuai dengan proporsi yang sesuai dengan posisi masing-masing karyawan (Barnes, 1995). Dalam hubungannya terhadap pencegahan *fraud*, melalui pelatihan yang tepat pada karyawan maka *fraud* dapat dicegah. Karyawan yang mengikuti pelatihan terkait kecurangan akan membuat tingkat kepatuhan karyawan tersebut meningkat. Sehingga *fraud* seharusnya dapat diminimalisir. Hal ini juga akan berdampak semakin baiknya pengendalian internal suatu organisasi (Khana dan Arora, 2009).

2.2.2.3.2 Sikap Positif terhadap Aturan

Sikap/persepsi yang positif terhadap peraturan dapat menjadikan seorang karyawan untuk menjadi lebih patuh terhadap peraturan tersebut, sehingga ketika seorang karyawan tersebut patuh terhadap aturan maka ia akan enggan melakukan tindakan pelanggaran aturan, termasuk didalam yaitu *fraud*. Sikap yang positif tersebut dapat dibangun melalui berbagai pelatihan yang diberikan kepada karyawan (Khana dan Arora, 2009).

2.2.2.3.3 Kesadaran terhadap Kecurangan

Sebaiknya setiap organisasi selalu memberikan berbagai program peningkatan kesadaran terhadap anggota baru dari organisasi tersebut. Program peningkatan kesadaran tersebut dapat berupa edukasi mengenai hal-hal apa saja yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan; dan penjelasan mengenai dampak/kerugian yang akan ditanggung setiap anggota ketika anggota tersebut melakukan perbuatan yang melanggar aturan seperti tindakan *fraud* (Zimbelman, Albrecht, Albrecht, dan Albrecht, 2014). Sehingga melalui program peningkatan kesadaran, harapannya dapat mendorong setiap anggota organisasi untuk patuh terhadap aturan, termasuk didalamnya dapat meminimalisir keinginan untuk melakukan *fraud*. Selain itu, melalui program peningkatan kesadaran terhadap *fraud*, karyawan akan semakin pandai untuk melakukan berbagai tindakan pengendalian untuk mencegah terjadinya *fraud* (Commercial Angles Newsletter, 2001).

2.3 Analisis Metode Pencegahan *Fraud* Barang dan Jasa

Pada bagian ini akan dijelaskan secara detail mengenai pengembangan hipotesis yang dibangun guna untuk mengetahui berbagai faktor yang efektif untuk melakukan pencegahan tindakan *fraud*.

2.3.1 *E-Procurement* dan Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Sistem pengadaan pemerintah secara elektronik (*e-Procurement*) bisa meningkatkan transparansi dan bisnis perubahan tata praktek dan mendorong pemasok baru untuk berpartisipasi dalam pengadaan publik (Harris dan Rajora, 2006). Selain itu, melalui pengadaan elektronik yang menggunakan Internet, dapat menghemat biaya, mengubah rutinitas pembelian, mengurangi waktu pengadaan, dan membangun hubungan dengan pemasok.

E-Procurement merupakan solusi untuk mencegah dan mengurangi adanya peluang terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini dikarenakan dengan adanya *e-Procurement* peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang atau jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan biaya serta dalam pelaksanaannya mudah untuk melakukan pertanggungjawaban keuangan (Jasin et al., 2007). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Faisal, Tarjo, dan Musyarofah (2014) menunjukkan hasil bahwa *e-Procurement* tidak dapat mencegah tindakan *fraud*. Berdasarkan uraian sebelumnya, diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: *E-Procurement* berpengaruh positif dalam mencegah *fraud* pengadaan barang dan jasa

2.3.2 Pengendalian Internal dan Pencegahan *Fraud* Barang dan Jasa

Sistem pengendalian internal memiliki tiga tujuan utama yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Committee of Sponsoring Organizations of Teadway Commission, 1992). Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen siap mengantisipasi sebuah kesalahan atau kecurangan. Jika pengendalian internal lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan *fraud* lebih besar. Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan *fraud* dapat diperkecil, dan jika kesalahan dan *fraud* masih terjadi, bisa diketahui dengan cepat dan dapat segera diambil tindakan-tindakan perbaikan sedini mungkin (Hermiyetti, 2011).

Pengendalian internal pada dasarnya adalah representasi dari keseluruhan kegiatan di dalam organisasi yang harus dilaksanakan, sehingga proses yang dijalankan oleh dewan komisaris ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dapat diwujudkan (Committee of Sponsoring Organizations of Teadway Commission, 1992). Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan suatu entitas pelayanan terhadap publik, oleh karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan suatu pemahaman mengenai pengendalian internal yang akan diterapkan. Apabila pengendalian internal diterapkan secara efektif maka dapat mencegah terjadinya kecurangan. Terbukti bahwa 5 komponen pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan memang efektif dalam mencegah adanya tindakan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa (Hermiyetti, 2011). Hal ini juga didukung oleh Zelmiyanti dan Anita (2015); dan Sari (2013) yang juga membuktikan bahwa pengendalian internal efektif untuk mencegah adanya tindakan *fraud*. Berdasarkan uraian sebelumnya, diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pengendalian internal berpengaruh positif dalam mencegah *fraud* pengadaan barang dan jasa.

2.3.3 Audit Internal dan Pencegahan *Fraud* Barang dan Jasa

Audit internal adalah jaminan obyektif dan independen, serta kegiatan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi (The Institute of Internal Auditors, 2009). Melalui Audit internal diharapkan dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan sistematis dan pendekatan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Tujuan adanya audit

internal adalah untuk membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar yang obyektif mengenai kegiatan yang telah direviu (Holmes dan Burns, 1988). Selain itu, peran audit internal adalah meninjau efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal dan untuk mengetahui apakah sistem bekerja sebagaimana dimaksud (Fadzil, Haron, dan Jantan, 2008). Sistem pengendalian internal yang efektif memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran organisasi itu akan tercapai. Audit internal berfungsi membantu manajemen dalam pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian, penyimpangan yang terjadi di suatu organisasi. Setiap organisasi harus memiliki unit audit internal sehingga penipuan dan kesalahan dapat dikurangi, karena audit internal dibentuk untuk mengendalikan dan memantau kegiatan organisasi dan untuk mengontrol terjadinya kesalahan dan penipuan (Monisola, 2013). Hal ini juga dibuktikan oleh penelitian yang telah dilakukan Zelmianti dan Anita (2015). Berdasarkan uraian sebelumnya, diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Audit internal berpengaruh positif dalam mencegah *fraud* pengadaan barang dan jasa.

2.3.4 Pelatihan yang Efektif dan Pencegahan *Fraud* Barang dan Jasa

Pelatihan pada dasarnya diberikan kepada seluruh karyawan dalam suatu organisasi guna menunjang kinerja dari karyawan itu sendiri (Barnes, 1995). Dengan adanya pelatihan yang efektif maka karyawan akan mendapatkan pengetahuan yang lebih dan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan praktik (Ziegenfuss, 1996).

Sistem *e-Procurement* diimplementasikan bertujuan untuk mengurangi kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa, oleh karena itu pelatihan sangat dibutuhkan untuk mendukung kesuksesan implementasi. Artinya, pelatihan yang efektif sangat diperlukan untuk memberi keterampilan terhadap staf atau karyawan yang terlibat dalam proses pengadaan. Melalui pelatihan yang efektif dapat membantu karyawan menjadi lebih patuh terhadap peraturan yang ditetapkan, hal ini akan membantu meminimalisir *fraud* dan pengendalian internal akan semakin kuat (Khana dan Arora, 2009). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) menunjukkan bahwa ternyata pelatihan yang efektif tidak memiliki pengaruh dalam pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan uraian sebelumnya, diajukan hipotesis sebagai berikut:

H4: Pelatihan yang efektif berpengaruh positif dalam mencegah *fraud* pengadaan barang dan jasa.

2.3.5 Sikap Positif terhadap Peraturan dan Pencegahan *Fraud* Barang dan Jasa

Peraturan diciptakan untuk dilaksanakan bukan untuk dilanggar. Pelanggaran peraturan dapat terjadi dikarenakan para pelaksanaannya kerap mempersepsikan negatif terkait dengan peraturan tersebut (Khana dan Arora, 2009). Mereka menganggap bahwa peraturan tersebut terlalu sulit atau rumit untuk diimplementasikan. Selain itu, ternyata melalui pengendalian internal yang buruk dalam satu organisasi juga dapat memicu pelanggaran peraturan yang lebih tinggi (Albreth et al., 1996). Sehingga persepsi yang positif terhadap suatu peraturan dapat menjadikan karyawan lebih mematuhi peraturan tersebut, sehingga sistem pengendalian internal akan lebih terjaga dan *fraud* dapat dicegah. Memberikan pelatihan kepada karyawan terkait dengan kecurangan dapat membuat karyawan menjadi lebih patuh terhadap peraturan dan menumbuhkan sikap positif terhadap peraturan (Khana dan Arora, 2009). Hal ini dikarenakan dengan pelatihan akan membuat karyawan lebih mudah dan memahami dalam melaksanakan tugas, sehingga akan dapat menumbuhkan sikap positif terhadap aturan dan pada akhirnya dapat mencegah adanya tindakan *fraud*. Hal ini juga telah dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013), yang telah membuktikan bahwa dengan tumbuhnya sikap yang positif terhadap aturan, maka akan membuat seorang individu akan semakin baik dalam mematuhi pelaksanaan pengendalian internal, yang kemudian akan mendorong pula untuk mencegah terjadinya tindakan *fraud*, termasuk *fraud* pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H5: Sikap positif terhadap peraturan berpengaruh positif dalam mencegah *fraud* pengadaan barang dan jasa.

2.3.6 Tingkat Kesadaran terhadap Kecurangan dan Pencegahan *Fraud* Barang dan Jasa

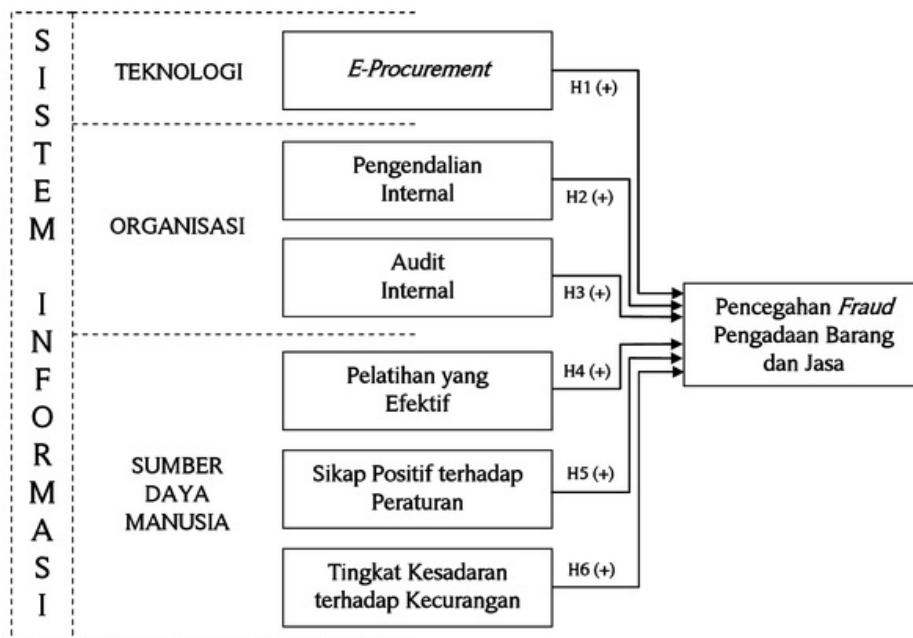
Terdapat dua konsep penting lainnya dalam pencegahan *fraud*, yakni menanamkan kesadaran tentang adanya *fraud* (*fraud awareness*) dan upaya menilai risiko terjadinya *fraud* (Tuanakotta, 2010). Cara terbaik untuk mencegah kecurangan adalah dengan memahami mengapa hal tersebut terjadi. Selain itu, diketahui pula bahwa karyawan akan semakin baik dalam melakukan pengendalian jika mereka memiliki suatu kemampuan yang didapat secara informal seperti melalui pelatihan dan program peningkatan kesadaran terkait dengan kecurangan (Commercial Angles Newsletter, 2001). Semakin tinggi tingkat kesadaran karyawan terkait kemungkinan terjadinya kecurangan dalam organisasi maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan karyawan terhadap peraturan di organisasi (Khana dan Arora, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) menunjukkan bahwa melalui program peningkatan kesadaran akan kecurangan dapat meningkatkan proses pencegahan tindakan

fraud pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, dalam upaya pencegahan *fraud*, suatu organisasi lebih baik mengadakan berbagai program yang dapat memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran setiap karyawannya tentang buruknya melakukan tindakan *fraud* dan dampak yang akan mereka terima jika melakukan tindakan *fraud*. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H6: Tingkat kesadaran terhadap kecurangan berpengaruh positif dalam mencegah *fraud* pengadaan barang dan jasa.

2.3.7 Model Efektif Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Pada buku ini, akan ditunjukkan berbagai faktor yang dapat mencegah *fraud* pengadaan barang dan jasa. Ilustrasinya dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Model Efektif Pencegahan *Fraud*

2.4 Menguji Metode Pencegahan *Fraud* Barang dan Jasa

Model pencegahan *fraud* barang dan jasa yang dibahas dalam buku ini akan diuji menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei berupa penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan desain pengambilan

sampel *non probability* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sekaran, 2006). Dengan kategori pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*), pengambilan sampel ini terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan karena memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan (Sekaran, 2006).

Responden yang akan dilibatkan merupakan responden yang memang sudah terlibat dengan kegiatan pengadaan dan barang. Sehingga sampel yang dipilih yaitu karyawan yang bekerja di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Detail terkait dengan responden dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Rincian Jumlah Responden

No	Responden	Jumlah Responden (Orang)
1	UPT LPSE	12
2	UPT ULP	95
Total Responden		107

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa responden mayoritas berasal dari karyawan yang bekerja UPT Unit Layanan Pengadaan (ULP). Sedangkan sisanya merupakan karyawan bekerja di UPT Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Sehingga total respondennya sebanyak 107 responden. Melalui 107 responden ini diharapkan dapat diketahui faktor apa saja yang efektif untuk mencegah *fraud* pengadaan barang dan jasa.

2.4.1 Tinjauan Strategi Analisis Data

Pengujian yang dibahas dalam buku ini akan menggunakan *Structural Equation Model* (SEM) yang kemudian akan dibantu dengan alat analisis *Partial Least Square* (PLS). Penggunaan PLS ini akan dilakukan melalui *software* SmartPLS versi 2.0. PLS adalah salah satu metode statistik SEM yang berbasis varian, didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data, seperti ukuran sampel penelitian kecil, adanya data yang hilang, dan multikolinieritas (Hartono, 2011).

Melalui model PLS maka tidak diperlukan asumsi distribusi normal, jumlah sampel yang diperlukan juga tidak begitu besar, dan bisa diaplikasikan pada penelitian yang bersifat *confirmatory* maupun *exploratory*. *Confirmatory* yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan hubungan dua variabel.

Sedangkan penelitian *exploratory* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggali atau mencari variabel-variabel yang terdapat pada suatu fenomena, kondisi ataupun *setting* sosial tertentu.

2.4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Model Efektif Pencegahan *Fraud*

Penelitian ini telah memenuhi syarat atas uji validitas dan reliabilitas (Lihat Lampiran 1). Uji validitas memiliki dua jenis pengujian yang dilakukan, yaitu uji validitas *convergent* dan *discriminant*. Uji validitas *convergent* dapat terpenuhi apabila nilai *average variance expected* (AVE) lebih besar dari 0.5, dengan nilai *cross loading* untuk setiap item juga memiliki nilai lebih dari 0.5. Sedangkan uji validitas *discriminant* dapat terpenuhi jika akar pangkat dua dari nilai AVE untuk masing-masing variabel lebih besar dari korelasi terbesar antara variabel tersebut dengan variabel lainnya (Fornell dan Larcker, 1981). Dalam uji reliabilitas, pengujianya akan menggunakan nilai dari *composite reliability* (CR) yang dihasilkan. Konstruk dapat dikatakan reliabel jika memiliki nilai CR lebih dari 0.7 (Latan dan Ghazali, 2012).

2.4.3 Karakteristik Demografis

Proses pengujian untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat digunakan untuk mencegah *fraud* ini akan melibatkan 107 responden. Dari keseluruhan responden yang dilibatkan tersebut memang mayoritas telah cukup berpengalaman dalam menggunakan *e-Procurement*. Sebanyak 54 responden (tingkat presentase 50.5%) telah ikut terlibat dalam penggunaan *e-Procurement* lebih dari 3 tahun. Akan tetapi responden yang terlibat dalam pengujian ini masih tergolong sedikit dalam mengikuti proses pelatihan tentang *e-Procurement*, yang mana dari keseluruhan responden tersebut hanya 34 responden saja (tingkat presentase 31.8%) yang telah mengikuti pelatihan di bidang *e-Procurement* lebih dari 4 kali.

Apabila dilihat dari sisi pendidikan, mayoritas responden telah berpendidikan pada tingkat sarjana (S1), dengan tingkat presentase sebanyak 65,4% (70 responden). Adapun jika dilihat dari umur mayoritas berumur pada usia dengan skala 31-40 tahun, dengan tingkat presentase 65,4% (70 responden). Laki-laki merupakan mayoritas responden dalam proses pengujian ini, yang berjumlah sebanyak 85 responden (tingkat presentase 79.4%). Sedangkan responden perempuan hanya sebanyak 22 responden saja (20.6%).

2.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan *Fraud* Barang dan Jasa

Berdasarkan tinjauan pustaka secara umum, telah dikembangkan 6 hipotesis yang dibuat guna mengetahui berbagai faktor yang efektif dalam pencegahan

fraud. Faktor-faktor yang dimaksud tersebut ialah *e-Procurement* (teknologi); pengendalian internal dan audit internal (organisasi); dan pelatihan yang efektif, sikap positif terhadap *fraud* dan tingkat kesadaran terhadap *fraud* (kualitas SDM). Hasil analisis terkait dengan ke-6 hipotesis secara detail akan dibahas pada bagian ini.

2.5.1 Hipotesis *E-Procurement* dan Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil *inner model* (Lihat Lampiran 2) terlihat bahwa koefisien *estimate* dari variabel sistem *e-Procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa adalah 0,139 dan *t* hitung sebesar 1,005 < 1,64. Hal ini berarti, bahwa hipotesis pertama yang menyatakan "Terdapat pengaruh positif penerapan *e-Procurement* dalam mencegah *fraud* pengadaan barang dan jasa" tidak didukung.

E-Procurement merupakan salah satu solusi guna mempersempit kesempatan terjadinya tindakan *fraud* terhadap pengadaan barang dan jasa, khususnya pada organisasi pemerintah. Akan tetapi hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa sistem *e-Procurement* tidak mendukung pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa. Hasil dari pengujian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Faisal et al. (2014), namun bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013). Kemungkinan penyebab mengapa sistem *e-Procurement* ini menjadi tidak signifikan, dikarenakan *e-Procurement* dalam proses implementasinya agar menjadi efektif untuk mencegah *fraud* juga harus didukung oleh faktor-faktor lain, misalnya budaya organisasi. Budaya suatu organisasi yang sejak awal memang kurang baik akan cenderung mendorong anggotanya untuk senantiasa melakukan hal yang buruk, karena mereka akan menganggapnya sebagai suatu kebiasaan dan wajar. Maka apabila suatu organisasi yang memang memiliki budaya dan lingkungan yang selalu mendorong anggotanya untuk melakukan *fraud*, maka akan percuma saja jika *e-Procurement* diimplementasikan pada organisasi tersebut, karena para pelaksananya (*user*) akan selalu berusaha mencari cara untuk melakukan *fraud* termasuk *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Maka dari itu, pemerintah daerah dalam mengimplementasikan *e-Procurement* juga harus memperhatikan faktor-faktor lain agar sistem ini memang menjadi lebih efektif untuk mencegah tindakan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hal ini dikarenakan pada dasarnya *e-Procurement* memang sangat efektif dalam mencegah *fraud* pengadaan barang dan jasa, karena prosesnya yang sangat transparan; optimalisasi waktu proses pengadaan barang dan jasa; peningkatan kualitas administrasi pengadaan barang dan jasa; keamanan data penawaran barang dan jasa; dan meminimalisasi tatap muka

antara panitia, peserta dan pengelola pengadaan barang dan jasa (Jasin et al., 2007).

2.5.2 Hipotesis Pengendalian Internal dan Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil *inner model* (Lihat Lamporan 2) terlihat bahwa koefisien *estimate* dari variabel pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa adalah 0,050 dan t hitung sebesar $0,457 < 1,64$. Hal ini berarti bahwa hipotesis kedua yang menyatakan "*Terdapat pengaruh positif pengendalian internal dalam mencegah fraud pengadaan barang dan jasa*" tidak didukung.

Melalui pengendalian internal, manajemen dapat memperkecil kemungkinan terjadinya tindakan *fraud* (termasuk pengadaan barang dan jasa), hal ini dikarenakan manajemen dapat membatasi berbagai akses dan kesempatan untuk mencegah terjadinya tindakan tersebut. Akan tetapi hasil dari pengujian ini menunjukkan hasil yang sebaliknya, yaitu pengendalian internal tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan tindakan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Joseph et al. (2015); dan Zelmianti dan Anita (2015). Ada beberapa kemungkinan penyebab tidak terbuktinya hipotesis kedua ini. Seperti diketahui, sebegus apapun pengendalian internal suatu organisasi, apabila masih terdapat pihak yang memiliki niat yang tinggi untuk melakukan *fraud*, maka *fraud* tetap akan terjadi. Hal ini dikarenakan *fraud* biasanya akan dilakukan lebih dari satu individu. Apabila individu-individu yang menjalankan fungsi pengendalian internal ini saling sepakat untuk melakukan *fraud*, maka mereka dapat secara bersamaan untuk tidak melaksanakan fungsi pengendalian internal dengan baik, sehingga hal tersebut akan membuat mereka lebih leluasa untuk melakukan *fraud*, termasuk *fraud* pengadaan barang dan jasa. Sehingga hal inilah yang mungkin dapat menyebabkan pengendalian internal menjadi tidak efektif untuk mencegah *fraud* pada proses pengadaan barang dan jasa.

Maka dari itu, untuk dapat memaksimalkan pengendalian internal guna untuk mencegah terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa, lebih baik suatu organisasi (seperti pemerintah daerah) sejak awal telah merekrut individu yang memang sudah sangat berpengalaman dan terpecaya dalam menjalankan proses pengendalian internal. Hal ini dikarenakan, *fraud* akan sulit dilakukan oleh pihak lain apabila terdapat pihak (yang menjalankan fungsi pengendalian internal) yang memang tidak mau diajak bekerja sama untuk melakukan *fraud*.

2.5.3 Hipotesis Audit Internal dan Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil *inner model* (Lihat Lampiran 2) terlihat bahwa koefisien *estimate* dari variabel audit internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa adalah 0,270 dan t hitung sebesar $2,822 > 2,326$. Hal ini berarti bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan “*Terdapat pengaruh positif Audit Internal dalam mencegah fraud pengadaan barang dan jasa*” didukung.

Hasil dari uji hipotesis yang ketiga ini telah membuktikan bahwa audit internal memang terbukti dapat mencegah terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa. Maka dari itu, harapannya hasil ini dapat dijadikan sumber yang relevan bagi para akademisi yang kedepannya ingin melakukan penelitian serupa. Hasil ini juga telah mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Fadzil et al. (2008); dan Zelmiyanti dan Anita (2015).

Melalui hasil dari pengujian ini, maka harapannya suatu organisasi (seperti lembaga sektor publik) yang memang berkomitmen untuk mencegah adanya tindakan *fraud* untuk senantiasa berusaha memaksimalkan pelaksanaan audit internal.

2.5.4 Hipotesis Pelatihan Yang Efektif dan Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil *inner model* terlihat bahwa koefisien *estimate* dari variabel pelatihan efektif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa adalah 0,134 dan t hitung sebesar $1,208 < 1,64$. Hal ini berarti bahwa hipotesis keempat yang menyatakan “*Pelatihan yang efektif berpengaruh positif mencegah fraud pengadaan barang dan jasa*” tidak didukung.

Pelatihan pada dasarnya diberikan kepada seluruh karyawan dalam suatu organisasi guna menunjang kinerja dari karyawan itu sendiri (Barnes, 1995). Dengan adanya pelatihan yang efektif maka karyawan akan mendapatkan pengetahuan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan praktik, prinsip-prinsip dari organisasi serta meningkatkan komitmen mereka dalam bekerja (Ziegenfuss, 1996). Sehingga dapat dilihat bahwa melalui pelatihan yang efektif akan membuat karyawan berusaha selalu patuh terhadap semua peraturan yang telah dibuat perusahaan, yang akan berdampak semakin mengecilnya kemungkinan terjadinya *fraud*. Akan tetapi, hasil dari pengujian ini menunjukkan hasil yang sebaliknya yaitu pelatihan yang efektif tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan tindakan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hasil dari pengujian memiliki hasil yang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013), namun berbanding terbalik dengan temuan dari penelitian Khana dan Aurora (2009). Tidak terbuktinya faktor ini dalam mencegah tindakan *fraud* khususnya pada pengadaan barang dan jasa di

pemerintah daerah, mungkin disebabkan karena masih rendahnya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah terkait dengan kegiatan dalam organisasi tersebut, terlebih terkait dengan pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Penyebab lainnya ialah faktor moral anggota organisasi. Jika pada dasarnya seorang individu memang memiliki moral yang buruk dan memiliki niat yang tinggi untuk melakukan *fraud*, maka mau sebanyak apapun pelatihan yang diberikan, maka ia akan tetap melakukan *fraud*.

Adanya hasil ini bisa menjadi pertimbangan atau pembelajaran bagi pemerintah daerah agar pelatihan yang akan diberikan terhadap karyawannya harus sesuai dengan kebutuhan karyawannya, supaya pelatihan yang diberikan bisa di implementasikan dengan baik dan tindakan *fraud* dapat diminimalisir. Selain itu pemerintah daerah, juga harus memberikan berbagai pelatihan yang dapat membenahi moral anggota organisasinya, misalnya dengan memberikan pembimbingan kearah yang religius.

2.5.5 Hipotesis Sikap Positif terhadap Peraturan dan Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil *inner model* (Lihat Lampiran 2) terlihat bahwa koefisien *estimate* dari variabel sikap positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa adalah 0,078 dan t hitung sebesar $0,476 < 1,64$. Hal ini berarti bahwa hipotesis kelima yang menyatakan “*Sikap positif terhadap peraturan berpengaruh positif mencegah kecurangan pengadaan barang dan jasa*” tidak didukung.

Persepsi yang positif terhadap suatu peraturan dapat menjadikan karyawan lebih mematuhi peraturan yang telah dibuat sehingga sistem pengendalian internal akan lebih terjaga. Hal ini tentunya akan berdampak pada pencegahan terjadinya *fraud*. Akan tetapi hasil dari pengujian ini menunjukkan hasil yang sebaliknya yaitu sikap yang positif terhadap peraturan tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap pencegahan tindakan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khana dan Aurora (2009); dan Sari (2013). Penyebab tidak terbuktinya pengaruh sikap positif terhadap peraturan ini dimungkinkan karena karyawan kesusahan dalam menjalankan peraturan dan adanya faktor budaya yang negatif dalam organisasi tersebut. Penyebab lainnya ialah faktor moral. Jika moral seorang individu memang tidak baik dan memiliki niat untuk melakukan *fraud*, maka *fraud* tidak dapat dihindari.

Melalui hasil ini, pemerintah daerah harus lebih memperhatikan lagi faktor-faktor yang dapat meningkatkan anggotanya untuk memiliki sikap yang positif terhadap aturan. Faktor yang dapat membenahi moral anggotanya juga harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, contohnya dengan menciptakan suasana yang religius dalam lingkungan kerja. Maka harapannya dengan

memperhatikan faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan sikap yang positif terhadap aturan setiap anggota organisasinya yang akan membuat *fraud* semakin diminimalisir.

2.5.6 Hipotesis Tingkat Kesadaran terhadap *Fraud* dan Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil *inner model* (Lihat Lampiran 2) terlihat bahwa koefisien *estimate* dari variabel tingkat kesadaran terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa daerah adalah 0,145 dan t hitung sebesar $1,798 > 1,64$. Hal ini berarti bahwa hipotesis keenam yang menyatakan “*Tingkat kesadaran terhadap kecurangan berpengaruh positif mencegah fraud pengadaan barang dan jasa*” didukung.

Semakin tingginya tingkat kesadaran karyawan terkait kemungkinan terjadinya kecurangan dalam organisasi, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan karyawan terhadap peraturan di organisasi (Khana dan Arora, 2009). Seharusnya pegawai perusahaan yang baru di rekrut, lebih baik untuk di ikutkan dan di edukasi mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam perusahaan beserta akibatnya bagi si pelaku dan perusahaan. Termasuk didalamnya edukasi tindakan *fraud* yang tidak boleh dilakukan (Zimelman et al, 2014). Maka melalui edukasi tersebut diharapkan pegawai perusahaan tersebut sadar untuk tidak melakukan tindakan kecurangan. Hasil dari pengujian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) yang membuktikan bahwa tingkat kesadaran terhadap kecurangan terbukti memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa. Maka dari itu, harapannya hasil dari pengujian ini dapat dijadikan literatur para peneliti kedepannya yang ingin melakukan penelitian yang serupa.

Melalui pengujian ini, maka kedepannya, sebuah organisasi perlu melakukan berbagai program yang dapat meningkatkan kesadaran pegawainya terhadap *fraud* guna untuk menekan tindakan *fraud* agar tidak terjadi di dalam organisasinya. Salah satu contohnya ialah dengan memberikan edukasi ancaman hukuman yang akan diterima bagi seseorang yang melakukan tindakan *fraud*.

2.6 Kesimpulan

Pengujian yang dibahas dalam buku ini dilakukan untuk melihat dampak dari penerapan *e-Procurement* (teknologi); pengendalian internal dan audit internal (organisasi); dan pelatihan yang efektif, sikap positif terhadap peraturan, dan tingkat kesadaran akan kecurangan (kualitas SDM) terhadap pencegahan *fraud*

pada pada pengadaan barang dan jasa di organisasi pemerintah daerah, tepatnya di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Hasil yang ditemukan adalah keenam variabel tersebut memiliki pengaruh yang positif, akan tetapi hanya dua variabel saja yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa, yaitu tingkat kesadaran akan kecurangan dan audit internal.

2.6.1 Kontribusi dan Implikasi

Hasil pengujian dalam buku ini telah memberikan kontribusi teori dengan membuktikan kembali bahwa audit internal (organisasi) dan tingkat kesadaran kecurangan (sumber daya manusia) dapat mencegah adanya tindakan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Harapannya, hasil dari pengujian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber tambahan yang dapat dijadikan oleh para akademisi kedepannya, terutama bagi para akademisi yang ingin melakukan penelitian yang serupa.

Melalui pembahasan dalam buku ini diharapkan pemerintah daerah harus memperhatikan berbagai faktor yang dapat mencegah adanya tindakan *fraud*, terutama pada proses pengadaan barang dan jasa yang rentan sekali terjadinya *fraud*. Mengingat besarnya kerugian yang akan diterima jika *fraud* tersebut tidak dapat dicegah. Melalui pengujian yang dibahas dalam buku ini telah dibuktikan bahwa variabel tingkat kesadaran akan kecurangan dan audit internal dapat mencegah *fraud*, maka harapannya pemerintah daerah harus melakukan berbagai program yang dapat meningkatkan kesadaran pegawainya terhadap kecurangan dan senantiasa untuk mendukung dan memaksimalkan proses audit internal.

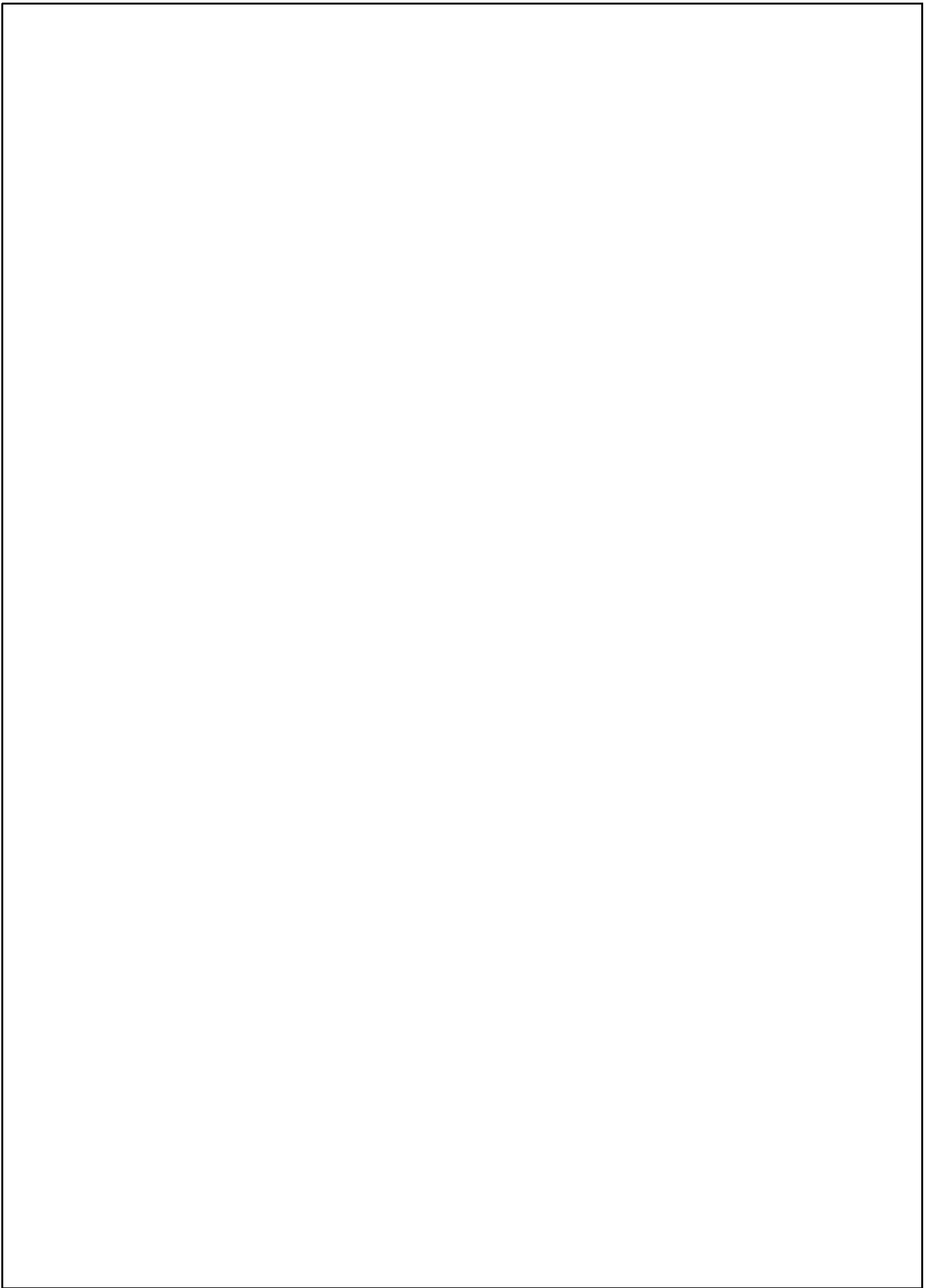
DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2014). *Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse: 2014 Global Fraud Study*. USA: Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).
- Aji, S. S. B., & Urumsah, D. (2016). Factors Affecting the Use of Forensic Accounting Services: An Empirical Study on Indonesian Banks. *Asia Pacific Fraud Journal*, 1(1), 147–163.
- Albrecht, W. S., Williams, T. L., & Wernz, G. W. (1995). *Fraud: Bringing Light to the Dark Side of Business*. Burr Ridge, IL: Irwin.
- Barnes, R. W. (1995). The Value of Quality Education to Banks and Bankers. *Journal of Indian Institute of Bankers*, 66(3), 55–59.
- Calderon, T., & Green, B. P. (1994). Internal Fraud Leaves its Mark: Here's How to Spot, Trace And Prevent it. *National Public Accountant*, 39(8), 1–17.
- Commercial Angles Newsletter. (2001). Fraud Prevention. *Commercial Angles Newsletter*. Diambil dari www.commercialangles.com/articles/fraud_control.htm
- Committee of Sponsoring Organizations of Teadway Commission. (1992). *Ademdem 1994. Internal Control Integrated Framework*. New York: AICPA Publication.
- Cressey, D. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Glencoe, IL: FreePress.
- Croom, S. R., & Jones, A. B. (2007). Impact of E-procurement: Experiences from Implementation in the UK Public Sector. *Journal of Purchasing & Supply Management*, 13(4), 294–303.
- Emmanuel, O., & Usman, H. (2015). Internal Audit Techniques and Fraud Prevention: A Case Study of Selected Local Government Councils in Bauch State. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(4), 232–244.
- Fadzil, F. H., Haron, H., & Jantan, M. (2008). Internal Auditing Practices and Internal Control System. *Managerial Auditing Journal*, 20(8), 844–866.
- Faisol, I. A., Tarjo, & Musyarofah, S. (2014). Pengaruh Penerapan E-Procurement terhadap Pencegahan Fraud di Sektor Publik. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 2(2), 71–90.
- 1
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39–50.

- Gunasekaran, A., & Ngai, E. W. T. (2008). Adoption of e-Procurement in Hongkong. *International Journal of Production Economics*, 113(1), 159-175.
- Harris, R., & Rajora, R. (2006). *Information and Communication Technologies for E-Governance and Poverty Reduction - A Study of Rural Development Project in India*. Regional Centre, Bangkok: UNDP-APDIP.
- Hartono, J. (2011). *Konsep dan Aplikasi Structural Equation Modelling Berbasis Varian dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hermiyetti. (2011). *Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang*. STEKPI.
- Holmes, A. W., & Burns, D. C. (1988). *Auditing Norma dan Prosedur* (9 ed.). Jakarta: Erlangga.
- Jasin, M., Zulaiha, A. R., Rachman, E. J., & Ariati, N. (2007). *Mencegah Korupsi Melalui E-Procurement: Meninjau Keberhasilan Pelaksanaan E-Procurement di Pemerintahan Kota Surabaya*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Joseph, O. N., Albert, O., & Byarahanga, J. (2015). Effect of Internal Control on Fraud Detection and Prevention in District Treasuries of Kakamega County. *International Journal of Business and Management Invention*, 4(1), 47-57.
- Khana, A., & Arora, B. (2009). A Study to Investigate the Reasons for Bank Frauds and the Implementation of Preventive Security Controls in Indian Banking Industry. *International Journal of Bussiness Science and Applied Management*, 4(3), 1-21.
- KPK. (2017). Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi. Diambil 5 Juni 2017, dari <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>
- Latan, H., & Ghozali, I. (2012). *Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 2.0 M3*. (P. P. Harto, Ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Mohamud, A. H. (2013). Internal Auditing Practices and Internal Control System in Somali Remittance Firms. *International Journal of Business and Social Science*, 4(4), 165-172.
- Monisola, O. (2013). Effect of Internal Audit on Prevention of Frauds, Errors And Irregularities In Corporate Organisation. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(19), 103-107.

- Moon, M. J. (2005). E-Procurement Management in the State Government: Diffusion of E-Procurement. *Journal of Public Procurement*, 5(1), 54–72.
- Naibaho, A. T. (2013). Analisis Pengendalian Internal Persediaan Bahan Baku terhadap Efektifitas Pengelolaan Persediaan Bahan dan Baku. *Jurnal EMBA*, 1(3), 63–70.
- Pearlson, K. E. (2001). *Managing and Using Information Systems: A Strategic Approach*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peters, B. G. (1999). *American Public Policy: Promise and Performance*. New York: Seven Bridges Press.
- Rotchanakitumnuai, S. (2013). The Governance Evidence of E-Government Procurement. *Transforming Government: People, Process And Policy*, 7(3), 309–321.
- Salsabika, A., & Prayudiawan, H. (2011). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan Audit dan Gender terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor Internal (Studi Empiris pada Inspektorat Wilayah Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 4(1), 155–175.
- Sari, P. D. P. (2013). *Analisis Penerapan E-Procurement, Pengendalian Internal, dan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Mencegah Fraud Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta)*. Universitas Gadjah Mada.
- Sawyer, L. B. (2005). *Internal Auditing* (5 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U. (2006). *Metode Penelitian untuk Bisnis* (4 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Soeharmoro. (2012). Peranan Internal Auditor dalam Pendeteksian dan Pencegahan Kecurangan. *Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(3), 7–11.
- Sucahyo, Y. G., & Ruldeviyani, Y. (2009). *Implementasi E-Procurement sebagai Inovasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP).
- Sukirman, & Sari, M. P. (2013). Model Deteksi Kecurangan Berbasis Fraud Triangle (Studi Kasus pada Perusahaan Publik Di Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 9(2), 199–225.
- The Institute of Internal Auditors. (2009). *Practice Guidance, Internal Auditing and Fraud*. USA: TheIIA.

- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Urumsah, D., Wicaksono, A. P., & Pratama, A. J. P. (2016). Melihat Jauh ke dalam: Dampak Kecerdasan Spritual terhadap Niat Melakukan Kecurangan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 20(1), 47-55.
- Wibawa, B. A. (2011). *Membedah E-Proc Konsultan*. Jawa Tengah: INKINDO.
- Willem, S. (2012). *Manajemen Pengadaan, Procurement Management*. Bandung: Alfabeta.
- Wolfe, D., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering Four Elements of Fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 38-42.
- Wulandari, L. I., EL Unas, S., & Hasyim, M. H. (2014). Kajian Penerapan E-Procurement untuk Mengurangi Penyimpangan pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Kota Malang. *Jurnal Rekayasa Publik*, 8(1), 7-16.
- Yuliani, S., Nadirsyah, & Bakar, U. (2010). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 3(2), 206-220.
- Zelmiyanti, R., & Anita, L. (2015). Pengaruh Budaya Organisasi dan Peran Auditor Internal terhadap Pencegahan Kecurangan dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 8(1), 61-76.
- Ziegenfuss, D. E. (1996). State and Local Government Fraud Survey For 1995. *Managerial Auditing Journal*, 11(9), 49-55.
- Zimbelman, M. F., Albrecht, C. C., Albrecht, W. S., & Albrecht, C. O. (2014). *Akuntansi Forensik*. Jakarta: Salemba Empat.



LAMPIRAN

Lampiran 1 – Evaluasi Pengukuran (*Outer Model*)

1. Uji Validitas

Tabel 1. *Initial Item Loadings* dan AVE Akhir

No	Variabel	Item Pertanyaan	Kode	Loading	AVE
1	Sistem <i>E-Procurement</i> (SE)	Jaminan kerahasiaan data panitia ketika akan mengikuti lelang secara elektronik telah terjaga dengan baik dengan dilengkapi <i>password</i>	SE1	0,670	0,517
		Sistem <i>e-Procurement</i> yang dikelola oleh LPSE sudah cukup mematuhi standar Keamanan sehingga dapat menjaminkerahasiaann dan integritas dokumen pengadaan untuk dilakukan pengadaan secara elektronik	SE2	0,865	
		Data informasi yang berkaitan degan <i>e-Procurement</i> pada pusat LPSE telah tersedia dengan lengkap	SE3	0,814	
		Sarana serta prasarana lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan lelang melalui aplikasi <i>e-Procurement</i> sudah memadai	SE4	0,759	
		Sistem yang dikelola LPSE sudah mematuhi <i>best practice</i> dari segi isi dan pengelolaan katalog sehingga penyedia tertarik untuk bergabung	SE7	0,609	
		Panitia perlu memiliki standar layanan <i>e-procurement</i> dan selalu bersikap jujur terhadap peserta lelang dalam memberikan pelayan layanan <i>e-Procurement</i>	SE8	0,587	
		Sistem Aplikasi <i>e-Procurement</i> pengadaan barang untuk pembelian secara lelang dapat meminimalisir adanya tatap muka dengan penyedia barang	SE9	0,684	
		2	Pengendalian Internal (PI)	Manajemen telah menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur	
Manajemen sudah mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyelesaian tugas dan fungsi pada masing-masing posisi	PI3			0,729	
Bagian pengadaan barang dan jasa/LPSE telah melakukan prosedur kerja yang sesuai dengan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah	PI4			0,676	

Tabel 1. *Initial Item Loadings* dan AVE Akhir (lanjutan)

		Dokumen lelang tersusun dengan baik	PI7	0,744	
		Manajemen memiliki, mengelola, memelihara dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting	PI9	0,683	
		Penetapan prosedur dan kebijakan yang berlaku dalam melindungi aset dan catatan perusahaan secara fisik dan non fisik sudah memadai	PI10	0,782	
		<i>Job description</i> yang sudah ada masih sesuai digunakan pada saat ini maupun masa yang akan datang	PI11	0,667	
3	Audit Internal (AI)	Audit Internal dalam melakukan pengujian bersifat objektif dan independen	AI1	0,803	0,697
		Audit Internal dalam melakukan evaluasi dan verifikasi bebas dalam mengakses semua catatan, memeriksa aktiva, dan karyawan yang relevan dengan audit yang dilakukan	AI2	0,886	
		Audit Internal dalam memberikan laporan dan opini selalu objektif, tidak bebas, tidak dibatasi dengan benturan kepentingan	AI3	0,800	
		Audit Internal dalam melakukan aktivitasnya menaati Standar profesi dan kode etik	AI4	0,848	
		Audit Internal selalu mengidentifikasi dan merumuskan masalah dalam melaksanakan tugasnya	AI5	0,834	
4	Pelatihan yang Efektif (PE)	Pernah mengikuti pelatihan yang terkait dengan pengadaan barang	PE1	0,668	0,530
		Saya merasa pelatihan mengenai pengadaan barang dapat membantu saya dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam melaksanakan tugas, dan saya merasa pelatihan yang lebih mendalam diperlukan	PE2	0,651	
		Pelatihan yang diberikan LPSE kepada panitia pengadaan sudah cukup memadai dan sesuai dengan pekerjaan	PE3	0,797	
		Komunikasi dan dukungan yang diberikan LPSE agar penyedia dan panitia pengadaan menggunakan SPSE sudah cukup bagus	PE4	0,785	

Tabel 1. *Initial Item Loadings* dan AVE Akhir (lanjutan)

5	Sikap terhadap Peraturan (SP)	Sistem operasional prosedur bagian pengadaan barang telah ditetapkan dengan baik	SP1	0,777	0,589
		Sistem operasional prosedur diimplementasikan dalam praktik kerja saya sehari-hari	SP2	0,793	
		Panitia pengadaan barang melaksanakan SOP dengan cermat	SP3	0,848	
		Panitia sudah melaksanakan pelelangan sesuai dengan peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah	SP4	0,755	
		Prosedur atau kebijakan lain yang digunakan oleh panitia tidak bertentangan dengan peraturan pengadaan barang/jasa	SP5	0,727	
		Perubahan prosedur dan kebijakan selalu diinformasikan kepada pihak-pihak terkait	SP6	0,694	
6	Tingkat Kesadaran akan Kecurangan (TK)	Panitia selalu menyadari adanya resiko kecurangan dalam proses pengadaan barang dari para penyedia barang	TK1	0,951	0,885
		Panitia menyadari adanya resiko kecurangan penentuan pemenang lelang pengadaan barang	TK2	0,928	
		Panitia menyadari adanya resiko kecurangan dalam penentuan harga penetapan sendiri pembelian barang	TK3	0,944	
7	Pencegahan <i>Fraud</i> (PF)	Organisasi harus mempunyai struktur, pembagian tugas, fungsi, aturan dan sanksi yang jelas	PF1	0,777	0,559
		Pimpinan harus berkoalisi dengan mitra kerjanya tanpa adanya unsur kecurangan	PF2	0,813	
		Apabila dalam koalisi terdapat unsur kecurangan maka perlu ditindaklanjuti sesuai aturan	PF3	0,609	
		Kebijakan yang menguntungkan beberapa pihak saja tidak dibenarkan dalam kondisi apapun juga	PF4	0,717	
		Peraturan yang sudah ditetapkan sesuai Anggaran keuangan tidak boleh disalahgunakan oleh siapapun	PF5	0,813	
		Apabila terdapat temuan kecurangan dalam menggunakan anggaran dalam proses pengadaan maka perlu diproses sesuai aturan	PF6	0,736	

Tabel 2. Nilai *Composite Reliability (CR)*, *Correlation of Latent Variables*, dan *Square Roots of AVE*

	CR	AI	SE	PE	PF	PI	SP	TK
AI	0,920	0,835						
SE	0,880	0,455	0,719					
PE	0,818	0,450	0,516	0,728				
PF	0,883	0,493	0,452	0,456	0,748			
PI	0,880	0,487	0,589	0,559	0,445	0,716		
SP	0,895	0,588	0,584	0,622	0,478	0,667	0,767	
TK	0,959	0,207	0,320	0,363	0,336	0,383	0,305	0,941

Lampiran 2 - Penilaian *Inner Model*

Tabel 3. Pengujian Hipotesis

Hipotesa	Path	<i>Path Coefficient</i>	<i>t-value</i>	Hasil
H1	SE->PF	0,139	1,005	Tidak Didukung
H2	PI->PF	0,050	0,457	Tidak Didukung
H3	AI->PF	0,270	2,822	Didukung
H4	PE->PF	0,134	1,208	Tidak Didukung
H5	SP->PF	0,078	0,476	Tidak Didukung
H6	TK->PF	0,145	1,798	Didukung

1. Pencegahan Fraud Dengan E-Procurement.pdf

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

lib.ibs.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; Http://www.uui.ac.id; E-mail: rektorat@uui.ac.id

Berita Acara Hasil Pengecekan Keaslian Karya Ilmiah Atas Nama Dekar Urumsah, Drs.,S.Si.,M.Com.,Ph.D. Untuk kenaikan Jabatan Dari Lektor (200 AK) ke Lektor Kepala (400 AK)

Pada tanggal 20 Februari 2019 telah dilakukan pengecekan *Originality* atau *Similarity* terhadap karya Ilmiah Dosen Tetap Universitas Islam Indonesia:

Nama : Dekar Urumsah, Drs.,S.Si.,M.Com.,Ph.D.

NIP/NIDN/NIK : -/0528026801/933120101

Prodi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

NO	KARYA	REPORT ORIGINALITY	KETERANGAN
1	Menghasilkan karya ilmiah berupa Buku referrensi dengan judul: Pencegahan Fraud Dengan E-Procurement, Penerbit Ekonesia FE UII, ISBN: 978-602-6617-05-7	2%	
2	Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal nasional terakreditasi dengan judul "Melihat jauh ke dalam: dampak kecerdasan spiritual terhadap niat melakukan kecurangan" (penulis pertama dari tiga penulis), Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia (JAAI)Volume 20 No.1, hal. 48-55, Juni 2016,P-ISSN: 1410-2420, E-ISSN:2528-6528, Akreditasi DIKTI No:36a/E/KTP/2016	0%	
3	Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal internasional dengan judul "Factors Influencing Employees to commit fraud in workplace empirical study in Indonesian Hospitals", (penulis kedua dari dua penulis) Asia Pasific Fraud Journal, Volume 1, No.1, Hal. 1-18, Januari-Juni 2016, ISSN: 2502-8731: E-ISSN:2502-695X, DOI:10.2153/apfj.001.16.01.01.01	3%	
4	Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal internasional dengan judul "Factors affecting the use of forensic accounting services an empirical study on Indonesian banks", (penulis kedua dari dua penulis) Asia Pasific Fraud Journal, Volume 1, No.1, Hal. 1-18, Januari-Juni 2016, ISSN: 2502-8731: E-ISSN:2502-695X, DOI:10.2153/apfj.001.16.01.01.01	0%	
5	Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal nasional terakreditasi dengan judul "Perilaku Pembajakan Produk Digital: Cerita Dari Mahasiswa Di Yogyakarta" (penulis kedua dari dua penulis), Jurnal APLIKASI BISNIS (ABIS)Volume 17, Nomor 1, P-ISSN: 1411-4054/e-ISSN: 2579-3217, Akreditasi DIKTI No:36a/E/KTP/2016	3%	
6	Menghasilkan karya ilmiah berupa penelitian/pemikiran yang dipresentasikan dan dimuat dalam prosiding seminar internasional dengan judul "Skills of the forensic accountans in public sector reveal fraud in Indonesia: an empirical investigation", (penulis ke dua dari tiga penulis) 8th international conference on financial criminology (ICFC) 2017, Putrajaya, Malaysia	7%	
7	Menghasilkan karya ilmiah berupa penelitian/pemikiran yang dipresentasikan dan dimuat dalam prosiding seminar internasional dengan judul "The effects of SAP implemntation on management	0%	

	accounting: an empirical investigation”, (penulis kedua dari dua penulis)the 6th international accounting conference, (IAC)Yogyakarta		
8	Menghasilkan karya ilmiah berupa penelitian/pemikiran yang dipresentasikan dan dimuat dalam prosiding seminar internasional dengan judul “Expectation Confirmation Model in the Transportation Order Applications: Gender Differences”, (penulis ke dua dari tiga penulis)Proceeding of the 31st International Business Information Management Assosiation Conference (IBIMA)25-26 April 2018, Milan, Italy, ISBN: 978-0-9998551-0-2	2%	
9	Menghasilkan karya ilmiah berupa /penelitian/pemikiran yang dimuat dalam prosiding seminar nasional dengan judul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Strategi Pengumpulan Data Business Intellegence”,(penulis kedua) Simposium Nasional Akuntansi SNA XVIII, Universitas Sumatera Utara, Medan	9%	
10	Menghasilkan karya ilmiah berupa penelitian/pemikiran yang dimuat dalam prosiding seminar nasional dengan judul “ Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidaketisan Penggunaan Komputer Oleh Pengguna Teknologi Informasi” (penulis kedua)Seminar Nasional dan Call for Papers,Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia IV, di FPIPS UPI Bandung, ISBN: 978-602-17225-4-1	8%	
11	Menghasilkan karya ilmiah berupa penelitian/pemikiran yang dimuat dalam prosiding seminar nasional dengan judul “Faktor Faktor yang Mempengaruhi Disaster Recovery Planning dan Busines Continuity Planning (studi Empiris pada Perguruan Tinggi di Indonesia)” (Penulis kedua)Simposium Nasional Akuntansi SNA XIX, Universitas Lampung, ISBN:978-979-19119-9-3	3%	
12	Menghasilkan karya ilmiah berupa penelitian/pemikiran yang dimuat dalam prosiding seminar nasional dengan judul “Investigasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi terhadap Kesuksesan Sistem Pendukung Keputusan di BUMN (Studi Empiris pada Pelni (Pelayaran Nasional Indonesia)” (Penulis kedua)Simposium Nasional Akuntansi SNA XIX, Universitas Lampung, ISBN:978-979-19119-9-3	4%	
13	Menghasilkan karya ilmiah berupa hasil penelitian atau pemikiran yang tidak dipublikasikan tersimpan di perpustakaan dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumen dalam Penggunaan Sistem E-Tiket (pada PT.KAI)”	0%	
14	Menghasilkan karya ilmiah berupa hasil penelitian atau pemikiran yang tidak dipublikasikan tersimpan di perpustakaan dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan ERP pada Tenaga Kependidikan UII”	7%	
15	Menghasilkan karya ilmiah berupa hasil penelitian atau pemikiran yang tidak dipublikasikan tersimpan di perpustakaan dengan judul “Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”	4%	
16	Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal nasional terakreditasi dengan judul “Pentingkah Nilai Religiusitas dan Budaya Organisasi untuk Mengurangi Kecurangan?”, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 9, Nomor 1, Hal.156-172, ISSN: 2086-7603, e-ISSN: 2089-5879, Akreditasi SK Mendikbud No. 212 /P/2014 Periode 2014-2019	0%	

17	Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal nasional terakreditasi dengan judul " Whistle-blowing Intention: The Effects of Moral Intensity, Organizational Commitment, and Professional Commitment" ,Jurnal Akuntansi, Volume XXII, Nomor 03, September 2018, Hal. 354-367,p-ISSN: 1410-3591, e-ISSN: 2549-8800, SK RISTEKDIKTI No.1/E/KPT/2015	0%	
----	--	----	--

Pengecekan di atas menggunakan alat Ithenticate dengan meniadakan (exclude) beberapa hal dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang kurang dari 2 persen.
2. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang disitasi oleh pihak lain.
3. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang terindikasi plagiasi kepada karya ilmiah yang bersangkutan.
4. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang menunjukkan url atau laman karya ilmiah yang bersangkutan.
5. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang diupload dalam bentuk yang berbeda (online pribadi) yang terdeteksi merupakan karya sendiri bukan merupakan laman publikasi Jurnal resmi hanya untuk kepentingan sharing (seperti <https://www.researchgate.net> facebook.com dll) sehingga bukan termasuk auto-plagiasi/self plagiarism.

Berdasarkan hasil pengecekan di atas, maka karya ilmiah tersebut di atas dapat diteruskan usulannya ke kopertis Wilayah V.

Yogyakarta, 20 Februari 2019

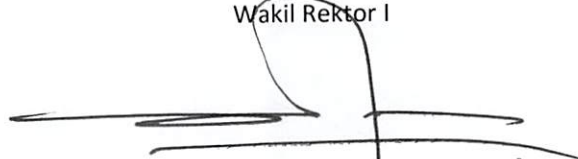
Rektor



Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.



Wakil Rektor I



Dr. Drs. Imam Djati Widodo, M.Eng.Sc.